



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH RAPAT KOMISI IX DPR-RI

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	1
Rapat ke	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	1. Dewan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan 2. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 25 September 2018
Pukul	:	13.00 WIB – selesai
Acara	:	Agenda dengan Dewas BPJS Ketenagakerjaan 1. Laporan kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017-2018; 2. Agenda Dewas BPJS Ketenagakerjaan ke depan dalam perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja (Dalam dan Luar Negeri Tahun 2019).

Agenda dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan

1. Realisasi dan upaya peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Pelaut Anak Buah Kapal dan Pelaut Perikanan Sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Proses kerjasama kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Asosiasi Profesi (seperti Peradi, IAI, Ikatan Notaris Indonesia; dan lain-lain) di Indonesia.

Ketua Rapat	:	DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I
Hadir	:	A. ANGGOTA KOMISI IX DPR RI

24 orang Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI

B. PEMERINTAH :

1. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Guntur Witjaksono beserta jajaran;
2. Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, beserta jajaran

KETUA RAPAT F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA):

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI,
Yang terhormat saudara Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta seluruh jajaran yang hadir,
Hadirin wal hadirat yang saya hormati,

Pertama sekali mari kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita bisa diberi waktu untuk dapat melaksanakan rapat dengar pendapat bersama dengan Dewan Pengawas dan juga Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelum saya membuka rapat ini perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa berdasarkan laporan dari Sekretariat DPR RI bahwa anggota yang sudah menandatangani daftar hadir terdiri dari 8 Fraksi dengan jumlah 10 Anggota. Dengan demikian dan izin ada 3 orang. Jadi ada 13 orang yang sudah melaporkan kehadirannya di dalam rapat ini. Maka sesuai dengan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat ini dinyatakan telah memenuhi kuorum. Dengan demikian rapat saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat dibuka pukul 14.25 WIB

Soal waktu sekarang sudah pukul 14.25 WIB. Saya tawarkan ini rapat untuk pertama kita batasi sampai pukul 16.00 WIB. Setuju Pak Imam? Sebelah kiri setuju ya

(Rapat Setuju)

Ada pun agenda rapat kita pada hari ini, sebagaimana undangan yang telah disampaikan kepada Dewas dan juga Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah:

1. Laporan kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan tahun anggaran 2017 – 2018.
2. Agenda Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ke depan dalam perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dalam negeri tahun 2019.

Agenda Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari:

1. Realisasi dan upaya peningkatan kepesertaan anak buah kapal dan pelaut perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia.
2. Proses kerja sama kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada asosiasi profesi seperti Pradi, IAI, Ikatan Dokter Indonesia dan lain-lain.

Untuk mempersingkat waktu bapak ibu saudara, saya mau mempersilakan dulu untuk yang pertama paparan dari Dewan Pengawas. Kami persilakan kepada Bapak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan paparan. Kalau bisa 15 menit itu bagus pak paling lama. Saya persilakan pak.

DEWAS KETENAGAKERJAAN:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh
Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua .

Yang terhormat Pimpinan Komisi IX, Wakil Pimpinan dan jajaran Anggota,

Perkenalkan kami dari Dewan Pengawas lima orang hadir disini, ada dua yang tidak hadir izin untuk tujuan pengembangan sedang melakukan kegiatan di luar kantor. Pertama-tama agenda yang pertama adalah kita paparkan mengenai laporan kinerja direksi tahun 2017 – 2018. Namun izin akan kita susun dari tahun 2015, dimana kami mulai bertugas setelah manajemen yang lama. Pertama indikator kinerja dari sisi capaian kepesertaan aktif. Sampai saat ini di tahun 2018 akumulasi kepesertaan telah mencapai 28,873 juta posisi Agustus dan dari tren tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terdapat pertumbuhan yang sesuai dengan renstra, artinya capaian-capaian pertahun memang diatas target renstra. Kurang lebih pertumbuhannya sekitar 3,4 sampai 3,6 juta peserta pertahun, dimana nanti di renstra tahun 2019 akan terdapat agresifgros dengan pertumbuhan sekitar 5 juta.

Dari sisi kepesertaan dari segmen jenis pekerja, pekerja penerima upah masih mendominasi yaitu 16,65 juta. Kemudian jasa konstruksi 10,09, kemudian BPU ini masih 1,82 juta dan pekerja migran Indonesia sekitar 310 juta 310.000 PMI. Ini masih terus berkembang untuk seluruh segmen. Berikut dari sisi pendapatan iuran, pendapatan iuran pertahun rata-rata tumbuh tetap tumbuh mulai dari tahun 2016 sekitar 48,623 triliun. Hingga sekarang targetnya 64,367 triliun dan di capai pada bulan Agustus 41,142 triliun atau sekitar 63,9%. Ini optimis untuk akhir tahun sampai bulan Desember target kiranya dapat di penuhi.

Untuk pekerja migran sendiri iuran sudah mencapai sekitar 73 miliar dan jumlah trennya sekitar 1,6 miliar, karena pekerja migran baru mulai tahun 2017. Berikut dari

sisi jumlah perusahaan peserta, peserta BPJS Ketenagakerjaan dari tahun ke tahun trennya tetap tumbuh dan selalu memang diatas restra atau target. Hingga Agustus tahun 2018 telah mencapai target dari target 550.000 perusahaan sudah mencapai 565.829 perusahaan. Berikut ini kita merujuk kepada data BPS mengenai Sakernas mengenai total pekerja Indonesia pada posisi 15 Desember 2017 adalah 121 poin 022423 juta. Kalau kita lihat penerima upahnya sekitar 48 juta dan bukan penerima upahnya sebesar tentunya 72 poin 1 juta.

Dengan melihat ini memang masih terlalu sedikit kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan yaitu kalau peserta BPJS TK yang terkait dengan penerima upah dengan asumsi jasa konstruksi masuk penerima upah itu sekitar 26,5 juta 16 ditambah 10 dan masih tersisa 21 poin 5 juta. Sedangkan untuk bukan penerima upah masih sangat besar sekali karena total pekerjanya 72 juta kita masih baru 2 poin 1 juta. Ini merupakan tantangan tersendiri yang saya kira di slide berikutnya, nah ini pekerja bukan penerima upah ini sebenarnya masih banyak potensi khususnya yang berusaha sendiri itu saja 23 poin 1 juta. Kemudian dengan berusaha dibantu orang lain atau dibantu pekerja 21 poin 9 juta. Yang tidak potensial barang kali yang terakhir pekerja keluarga yang tidak di bayar sekitar 14 poin 8 juta barang kali ini juga bisa dijadikan target PBI kalau memungkinkan.

Berikut catatan kinerja kepesertaan dari direksi kami bisa rangkum. Yang pertama kepesertaan aktif tumbuh sekitar 3 juta peserta pertahun dari tahun 2016 – 2018. Pertumbuhan akan lebih besar bila peraturan klaim JHT kembali ke Undang-Undang SJSN. Sekarang ini masih terdapat antrian untuk mengklaim JHT yang notabennya mereka adalah dari kepesertaan. Untuk tahun 2019 pertumbuhan ditargetkan cukup agresif sekitar 5 juta peserta. Kemudian dari total pekerja bukan penerima upah sebesar 72 poin 175 juta atau 60,3% pekerja Indonesia. Capaian kepesertaan 1,82 juta yaitu sekitar 2,5% masih terlalu rendah. Ini tentunya direksi perlu memfokuskan kepada inisiatif gerakan nasional lingkaran yang dulu telah di *launching* melalui pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk akuisisi pekerja rentan perlu konsistensi dan promosi yang lebih masif.

Kemudian implementasi prisai juga perlu evaluasi walaupun sudah berjalan untuk di sempurnakan sekemanya. Juga inovasi dalam proses akuisisi BPU maupun kemasan produknya agar lebih menarik dan ini belum dilakukan secara intensif. Kemudian promosi manfaat BPJS Ketenagakerjaan ke pertaan wajib sanksi pelayanan publik juga masih kurang masif khususnya ke perusahaan menengah ke bawah atau UMKM dan industri rumah tangga. Khusus dari kepesertaan PMI ada beberapa hal tentu ini menyangku PMI yang baru 310.000 jiwa ini tentunya hanya yang berangkat melalui BNP2TKI yang tidak berangkat melalui BNPTKI atau yang mandiri ini yang belum bisa kita monitor dan saya kira mereka cukup besar jumlahnya khususnya ke Malaysia dan perlu dilakukan sosiali yang lebih intensif di dalam negeri maupun pada masa *predibacer orientation*.

Berikutnya beberapa catatan kepesertaan program PMI antara lain perlunya *training of trainer* kader-kader BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas sosialisasi kepada PMI. Kemudian mekanisme pembayaran iuran ini kanal di luar negeri masih menjadi masalah, kita sedang memikirkan bersama bagaimana pembayaran pesera

khususnya untuk JHT-nya itu juga kanal-kanal perbankan belum kondusif bagi para PMI. Kemudian bagi PMI yang telah memenuhi perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian dan (...) penempatan BPJS Ketenagakerjaan perlu mendorong agar PMI terdaftar program jaminan hari tua, karena sangat penting apabila mereka kembali ke Indonesia tentu sudah mempunyai tabungan yang cukup. Berikut kemudian kami mencoba melihat dari indikator akumulasi dana jaminan sosial.

Dari tahun 2015 sampai tahun 2018 tres akumulasi dana jaminan sosial yang tentunya ini berasal dari iuran dan pengembangan ini cukup signifikan meningkat sampai saat ini Agustus total kelolaannya 328,4 triliun dan masih di targetkan mencapai 356.99 triliun di akhir Desember nanti. Ini segmentasi programnya masih tetap JHT yang menjadi dominasi akumulasi walaupun klaimnya sudah diatur apa menjadi sangat mudah tetapi memang masih tumbuh walaupun kecil masih tumbuh, tidak berkurang yang merah itu. Kemudian juga pensiun juga sudah mulai tumbuh namun ini memang perlu kenaikan manfaat yang sudah kita usulkan tetapi belum ada respon dari regulator. Berikut ini dari sisi hasil investasi dana jaminan sosial dari hasil pengembangan pertahunnya ini memang berfuktuatif pada tahun 2015 manajemen lama tidak mencapai target.

Kemudian tahun 2016 – 2017 sesuai target melebihi target dan di tahun 2018 ini kita agak khawatir saat ini dari target 31,08 triliun ini masih mencapai 18,19 itu masih 58% ini tentunya terkait dengan anjloknya USG dan juga mungkin relokasi yang agak terlambat dari manajemen. Ini memang kita agak khawatir untuk pencapaian ini. Berikut pengembangan jaminan hari tua ini karena aturannya harus diatas bunga deposito alhamdulillah manajemen direksi dan Dewas sekarang ini bisa terus diatas. Pada tahun 2015 memang sangat sempit dengan bunga deposito tetapi kita terus bertahan diatas bunga deposito. Berikut yang kurfa ini menyangkut aset BPJS Ketenagakerjaan jadi Badan ini mempunyai kelolaan aset tersendiri diluar dana jaminan sosial, ini dari tahun ke tahun memang signifikan meningkat dari pertama kali.

Kita hadir di tahun 2015 akhir itu 11,08 triliun kita saat ini tahun 2017 14,46 triliun, untuk tahun 2018 masih menunggu audit dari KAP tentu ini berasal dari aset ext Jamsostek, kemudian juga dari surplus dana operasional dan juga pengembangan investasi Badan. Berikut rangkuman dari catatan kinerja keuangan dan investasi bisa kami sampaikan bahwa adanya dana jaminan sosial tetap tumbuh, hasil investasi dana jaminan sosial per-Agustus relatif rendah 58,9% dari target yang kita khawatirkan tidak memenuhi renstra. Kemudian meskipun klaim JHT meningkat namun akumulasi dana masih tumbuh, pengembangan JHT masih berada diatas bunga deposito. Kemudian aset Badan atau aset BPJS TK mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 11,08 triliun di tahun 2015 menjadi 14,4 triliun atau sekitar 3,4 triliun.

Baik karena pengembangan investasi Badan maupun surplus dari dana operasional Badan. Berikutnya mengenai pelayanan, yang kami catat dari pelayanan pertama adalah *call center*, *call center* telah di *upgrade* oleh direksi yang baru ini tetapi masih memerlukan upaya-upaya penyempurnakan terutama *one kid call center* khususnya untuk eskalasi isu-isu dari daerah masih harus menunggu. Ini kami dorong tetap itu di *upgrade*. Kemudian juga inovasi baru atau masih dalam (...) (...) *project* itu

pendaftaran secara biometrik. Jadi para pekerja yang tidak mempunyai NIK sebetulnya bisa di daftarkan melalui *finger print*-nya. Ini masih (...) *project* kemudian antri *online* untuk menghindari akumulasi di kantor cabang dan ini masih menjadi juga permasalahan mengenai sentralisasi kepesertaan oleh perusahaan.

Jadi ada beberapa perusahaan di daerah yang memang kepesertaannya disentralisasi di Jakarta terutama perusahaan multinasional atau perusahaan besar sehingga peserta di daerah merasa kurang terlayani karena kantor cabang pembagian (...) belum begitu sempurna sehingga mereka merasa itu urusan pusat. Ini memang perlu di perbaiki tahap demi tahap. Kemudian migrasi IT kami baru saja melakukan migrasi IT dari sistem yang lama menjadi baru *smile* namanya, ini sempat membuat keluhan peserta dan masih perlu di monitor dan di perbaiki. Namun alhamdulillah sekarang sudah berkurang keluhannya. Kemudian promosi manfaat program dan pelayanan masih kurang di bandingkan promosi kelembagaan.

Ini memang strategi yang harus dimulai dirubah bahwa imit BPJS Ketenagakerjaan itu jauh memang dengan BPJS Kesehatan dari segi Lembaga tetapi kita harus mendorong manfaatnya promosi manfaatnya dan pelayanannya ini masih baru mulai belum masif. Berikut catatan kinerja pelayanan bagi PMI dalam jangka panjang diperlukan solusi untuk melakukan assessment potensi penyakit akibat kerja yang dialami PMI. Jadi karena PMI berada diluar negeri apabila terjadi penyakit-penyakit yang harus ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan terutama penyakit akibat kerja ini memang belum punya cara-cara assessment yang handal dan kedepan tentu perlu di pikirkan. Kemudian kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sangat diperlukan di negara penempatan, karena masih banyak ditemukan PMI yang melakukan perpanjangan kontrak dengan konsorsium lama akibat keterdapatn kanal pembayaran.

Jadi memang ini masalah PMI yang mengalami selesai kontrak di Malaysia katakanlah, perpanjangannya harus mencari kanal pembayaran BPJS. Sementara yang dulu konsorsium punya kerja sama dengan agen-agen lokal di Malaysia, mereka menawarkan dan terjadilah transaksi dengan menggunakan konsorsium lama. Berikut ada gambaran perbaikan *one call center* yang kami sampaikan di depan tadi, dulu ada di Bandung sekarang di Mampang dengan perbaikan cukup signifikan. Kalau dulu hanya dengan telepon dan medsos sekarang sudah ada telepon medsos dan juga imbon outbound. Kemudian jam pelayanannya pun semakin besar. Kemudian jenis pelayanannya juga menyangkut informasi semua jenis pengaduan dan permintaan. Kemudian juga banyak hal-hal yang di improv dari *call center* yang semakin intensif ini,

Berikut kemudian catatan kinerja renstra dan informasi teknologi ini masih kita bahas terus mengani skorkat untuk kinerja direksi baru akan disusun dan baru di bahas bahkan ini masih diskusi terus agar tanggung jawab direksi teknis menjadi jelas dan mempunyai benang merah dengan karyawan di bawahnya. Ini memang sudah ada peraturan DJSN mengenai kinerja Badan cuma memang bagaimana untuk membobot direksi sampai ke bawah karyawannya memang belum bisa dilakukan dengan baik. Kemudian Kantor Cabang Pembantu (KCP) kalau bapak ibu pernah kesana ini perlu di evaluasi usianya sudah lebih dari setahun tetapi isunya adalah ada

yang overloud, ada yang memang kurang efisien. Jadi ini kami minta dari pada direksi untuk dilakukan total evaluasi sehingga lebih efektif keberadaan kantor cabang pembantu yang notabennya petugasnya hanya 3, 4 orang.

Kemudian tata kelola pengembangan IT masih perlu di perbaiki dan terdokumentasi dengan baik antara lain pembentukan tim lintas unit dan master grandesain pengembangannya, karena ini menyangkut juga kebutuhan antar unit. Kemudian berikut catatan kinerja SDM dan umum. Yang pertama mengenai TKAD (Tenaga Kerja Alih Daya) yang barang kali Komisi IX juga konsen pada di awal perpindahan Jamsostek kepada BPJS Ketenagakerjaan dimana ada 88 orang TKAD masih bermasalah. Alhamdulillah sampai saat ini 50 orang berhasil bekerja kembali baik di BPJS Ketenagakerjaan dan di anak Badan. Sisanya ada yang mengundurkan diri menggunakan paket perjanjian bersama bonus dan sebagainya. Kemudian tadi juga terkait dengan isu KPA (...) beberapa temuan menemukan belum sinkronnya dengan per-DJSN nomor 1 mengenai kinerja Badan.

Kemudian pola jenjang karya dan mutasi karyawan ini masih punya isu-isu yang belum jelas ada satu karyawan terlalu lama. Kemudian dari daerah susah sekali ke pusat, ini saya kira perlu kedepannya dilakukan perbaikan. Jabatan lowong terlalu lama juga masih terdapat. Kemudian belum mendorong profesionalisme entitas anak Badan untuk lebih kompetitif. BPJS mempunyai 3 anak Badan PT Bicak, PT Sango dan PT Sip ini memang terkesan belum dikelola secara profesional. Saya kira komisarisnya bisa lebih mendorong, karena kalau memang profesional tentu di isi oleh orang-orang yang profesional bukan memang sekedar parkir-parkiran karyawan-karyawan yang memang tidak mempunyai kompetensi untuk bidang-bidang tersebut. Berikut ini tadi cerita dari penyelesaian tenaga kerja ahli daya jadi 88 perselishan di tahun 2016 alurnya 72 orang mengikuti opsi yang ditawarkan oleh manajemen.

Kemudian 16 memilih untuk mengambil pesangonlah katakanlah dan yang terakhir ada yang tidak lulus juga karena mereka tetap mengikuti proses ada tidak lulus tetapi tadi 50 orang bekerja kembali. Berikut yang terakhir agenda mengenai agenda Dewas tahun 2019. Berikut kegiatan rutin yang dilakukan Dewas tentu setiap minggu melakukan rapat setiap sebulan sekali paling tidak rapat gabungan dengan direksi untuk menyampaikan isu-isu dan mencari penyelesaian permasalahan. Kemudian tugas pokoknya antara lain menetapkan angkutan publik untuk dilakukan review terhadap laporan keuangan dan laporan pengelolaan program yang nantinya di laporkan kepada Presiden dan di tayangkan dalam koran sebagai bagian dari pertanggung jawaban publik.

Kemudian pengawasan aset terutama perpindahan-perpindahan aset yang menjadi kewenangan Dewas karena diatas jaminan aset Badan yang diatas sampai dengan 500 100 miliar itu harus izin Dewan Pengawas. Kemudian tentu kordinasi dengan DJSN khususnya dalam rangka monev DJSN kami selalu berdampingan menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS tk tahun 2020 itu nanti. Kemudian juga menilai kewajaran perhitungan cadangan teknis untuk JKKJKM. Kemudian juga perhitungan aktuaris untuk JHT dan JP (...) (Jaminan Hari Tua dan Jaminan (...)) melalui aktuaris independen. Ini maksudnya untuk memberikan kounter terhadap perhitungan direksi. Kemudian tentu untuk mencapai semua hal itu kita memerlukan

kegiatan kajian penelitian pendalaman substansi dan juga tindak lanjut bagaimana temuan auditor eksternal PPK, OJK. KAP untuk segera ditindak lanjuti dan juga tentu program pengembangan Dewan Pengawas melalui workshop, training dan seminar.

Berikut telah terdapat beberapa rekomendasi Dewas sesuai dengan Undang-Undang kami ini memberikan rekomendasi. Di tahun 2016 ada 62 rekomendasi kami melihat kita assessment 75% sudah di tindak lanjuti, tahun 2017 32 rekom sekitar 80% sudah, tahun 2018 ada 36 rekom sampai September sekitar 50% sudah di tindak lanjuti dan tahun 2019 nanti kami dan direksi tentunya mendorong agresif gross pengawasan akan lebih strategis dalam rangka menunjang pertumbuhan yang agresif. Kemudian kegiatan rutin juga di imbangi juga dengan kegiatan teknis oleh komite-komite yang dibentuk Dewas ada 4 komite. Komite anggaran audit dan auktaria yang menyangkut governance diantaranya melakukan internal kontrol evaluasi internal kontrol setiap unit-unit yang ada di dalam manajemen.

Kemudian bagaimana aktifitas penyerapan anggaran menyangku evaluasi piutang iuran dan tindak lanjut (...) yang sudah dibentuk. Evaluasi pendayagunaan aset tetap, kemudian tindak lanjut temuan audit eksternal internal, perbaikan sistem penganggaran, kemudian selalu mengadakan workshop seminar FGD terhadap isu – isu yang aktual terjadi. Untuk manajemen resiko dan TI ini masih mereview bagaimana temuan-temuan atas tata kelola investasi, apakah memang sudah ada perbaikan. Kemudian juga mayoritas manajemen resiko dan tata kelola teknologi informasi. Untuk komite perluasan kepesertaan dan pelayanan kami melakukan penelitian kajian untuk evaluasi program Jamsos untuk PMI. Ini beberapa setelah dilakukan di Hongkong Taiwan dan untuk daerah lain yang belum terbuka misalnya di Timur Tengah maupun di Korea masih terus akan kita lakukan evaluasi.

Kemudian juga epektifitas sistem perisai, perisai ini salah satu instrumen yang di bentuk keagenan yang memang di harapkan bisa mendorong kepesertaan secara masif khususnya untuk BPU. Kemudian untuk komite kebijakan pengelolaan kinerja organisasi dan SDM kita masih perlu membahas mengenai stunting *evolution of training*, kemudian KPA juga, talent manajemen dan *seucesen planing* dan juga mengkaji mengenai produktifitas.....(**rekaman terputus**) yang terakhir Bapak Ibu Anggota Komisi IX. Anggaran Dewas ini jumlahnya sebesar 57,3 miliar untuk tahun 2019 atau sekitar 1,01% dari total RKAT BPJS. Di tahun 2019 kegiatannya untuk hononarium tentunya perjalanan dinas pengembangan Dewas rencana dan pengembangan Dewas dan tunjangan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Saya kira itu,

Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan,

Mudah-mudahan presentasi dapat bermanfaat dan kami sangat senang apabila ada pertanyaan dan saran-saran. Demikian *wabillahi taufik hidayah*.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

F-GOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua saya izin dulu. Pak Ketua Dewas saya mau tanya sebentar sebelum dilanjutkan ke Direksi BPJS. Ini Dewan Pengawas ada berapa orang pak?

DEWAS KETENAGAKERJAAN:

7 orang pak.

F-GOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Yang sekarang hadir berapa?

DEWAS KETENAGAKERJAAN:

Ada 5 pak.

F-GOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oh saya pikir, yang dua ini masih ada?

DEWAS KETENAGAKERJAAN:

Dua ada tadi.

F-GOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Masih kompak ya pak ya?.

DEWAS KETENAGAKERJAAN:

Masih pak masih.

F-GOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Masih kompak ya?.

DEWAS KETENAGAKERJAAN:

Karena sedang pengembangan di luar kota pak.

F-GOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oh. Dua orang ini jadi tidak hadir ya?

DEWAS KETENAGAKERJAAN:

Iya. Pak Pompida dari tokoh masyarakat dan Pak Eko dari serikat pekerja.

F-GOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Tetapi masih solid kan?

DEWAS KETENAGAKERJAAN:

Masih pak Insya Allah.

F-GOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Jadi tidak ada masalah kan?

DEWAS KETENAGAKERJAAN:

Tidak ada.

F-GOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oh baik. Iya saya cuma mau ini saja, tadi kan Pak Ketua Dewas tidak menyampaikan berapa orang yang hadir dan berapa orang yang tidak hadir. Sudah ya tadi ya. Saya mohon maaf mohon maaf agak-agak lupa lupa tetapi masih kompak tetap ya? Oke. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih.
Lanjut Pak Dirut. Silakan pak.

DIRUT BPJS TK (AGUS SUANTO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh
Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Para Anggota Komisi IX DPR RI,
Jajaran Dewan Pengawas,
Rekan-rekan Direksi dan seluruh hadirin,

Perlu kami sampaikan bahwa dari jajaran direksi yang hadir hari ini ada 5 direksi dua mohon izin tidak dapat menghadiri karena salah satu menghadiri kegiatan atau rapat di Kementerian dan satunya sedang dalam mengikuti program pengembangan. Sesuai dengan surat yang kami terima dari Sekretariat Komisi IX bahwa agenda RDP pada hari ini adalah ada dua pokok bahasan

1. Realisasi dan upaya peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja pelaut anak buah kapal dan pelaut perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.
2. Sedangkan pokok bahasan yang kedua adalah tentang proses kerja sama kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada asosiasi profesi seperti peradi, IAI dan lain-lainnya.

Saya akan mulai dari pokok bahasan yang pertama, namun demikian untuk mengingatkan kita kembali bahwa landasan hukum atas perlindungan pekerja migran Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 di Pasal 4 Ayat (1) bahwa pekerja migran Indonesia meliputi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja Berbadan Hukum. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga dan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Kemudian Pasal 29 dan Pasal 64, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan perlindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf C diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian ada juga landasan hukum dari Permenaker nomor 7 tahun 2017 program jaminan sosial tenaga kerja Indonesia Pasal 2 dengan Pasal 3 dan Pasal 4. Kami lanjut tentang data kepesertaan pekerja migran Indonesia, ini adalah data rekapitulasi kepesertaan sampai dengan bulan Agustus 2018 dari status TKI yang calon TKI ada 144.837, kemudian yang TKI baru atau PMI baru 228.000, kemudian yang TKI atau PMI re-entry ada 24.521 dan total 390.8326 per akhir Agustus 2018. Kalau kita melihat rekapitulasi PMI berdasarkan negara penempatan sampai dengan bulan Agustus yang terbanyak adalah di Malaysia sebanyak 102.910, yang kedua adalah Taiwan 71.540, berikutnya adalah Hongkong, Singapura, Saudi Arabia dan beberapa negara yang lainnya yang tidak kami sebut satu persatu. Kalau kita melihat dari bidang industri tempat para PMI ini bekerja yang terbanyak adalah untuk bidang industri sebagai domestik worker, kemudian care giver dan operator platform walkes, kemudian walkes, teknition hidrolik, kemudian green operator dan visermnen yang nelayan ini menempati urutan ke delapan dari bidang industri yang penempatan untuk para PMI kita.

Kalau kita melihat lebih detail lagi tentang data kepesertaan viermen nelayan, negara penempatan yang terbanyak adalah di Taiwan untuk visermen ada 3028, kemudian Korea Selatan, kemudian Somalia, Malaysia, Hongkong, Maritus, Singapura dan Srilangka. Pendaftaran untuk para PMI ini dilakukan melalui sisko TKLN jadi kita telah berintegrasi atau terintegrasi sistem BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem yang ada di BNP2TKI. Selain yang bisa daftar langsung, jadi mereka bisa mendaftar

menggunakan sisko TKLN, kemudian bisa mendaftar melalui cabang-cabang kami dan juga bisa mendaftar secara langsung menggunakan aplikasi mobile kita atau melalui website kita.

Upaya peningkatan kepesertaan pekerja migran yang kita lakukan khususnya bagi pekerja pelaut ABK dan pelaut perikanan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BNP2TKI sejak Agustus tahun 2017 sejak kami mendapatkan mandat untuk memberikan perlindungan kepada para nelayan dan seluruh calon TKI prosedural yang akan berangkat ke luar negeri wajib mendaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian juga kita lakukan sosialisasi yang cukup masif di lima wilayah terbesar kantong-kantong PMI antara lain Mataram, Cirebon, Cilacap, Malang, Belitar dan Ponorogo. Kemudian juga berkordinasi dengan Indonesian visermen asosiation atau invisa Tegal dalam rangka sosialisasi program PMI bagi anak buah kapal ABK.

Selanjutnya usulan dan harapan BPJS Ketenagakerjaan untuk penanganan para PMI ini khususnya kepada para pekerja pelaut ABK dan pelaut perikanan yang pertama adalah pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara lengkap terkait perlindungan jaminan sosial bagi PMI, pelaut awak kapal. Ini sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Pasal 64. Kemudian juga usulan kami adalah pembahasan subtansi PP agar lebih koprehensif melibatkan antar Kementerian Lembaga antara lain:

- Kemenaker
- Kementerian Kelautan Perikanan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Hukum dan HAM
- BNP2TKI
- BPJS Ketenaga Kerjaan dan juga BPJS Kesehatan

Usulan berikutnya adalah untuk kepastian terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan pembudidaya ikan dan petambak garam di dalam negeri dalam program jaminan sosial untuk memberikan kepastian perlindungan pada mereka tersebut yang saat ini masih ditangani oleh konsorsium. Kemudian proses kerja sama “maaf saya akan masuk ke pokok bahasan yang kedua” terkait dengan proses kerja sama kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan asosiasi profesi seperti peradi, IAI, katanotaris dan lain-lain. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama kemitraan untuk kepeningkatan kepesertaan diantaranya dengan Kementerian, dengan organisasi atau Lembaga lainnya dengan asosiasi. Dengan Kementerian diantara lain:

- Dengan Kemendagri.
- Dengan Kemendes.
- BPJS Kesehatan.

- Dirjen Imigrasi.
- Sosial.
- Dirjen Kekayaan Negara,
- Jamdatun dsb.

Kemudian untuk organisasi atau Lembaga dengan BRI, Jiwsraya, Perhutani, Koni, Defasnas, Muhamad Yah, Persatuan Gereja, Pasar Polis, Agregator, Switsing, Perbankan. Kerja sama dengan asosiasi diantaranya dengan Ikatan Notaris Indonesia, dengan Forum Rektor Indonesia, Film Tropi Indonesia, dengan Apkasi, UKM dan IKM Nusantara serta dengan Gojek. Kerja sama kemitraan tersebut diantaranya adalah untuk peningkatan kepesertaan. Seperti dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka fasilitas dan penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa, yang saat ini sudah terdaftar 147.466 tenaga kerja atau Aparatur Desa telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian dengan Kementerian Desa dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan tenaga pendukung program pada Dorektorat Pembangunan Pemberdayaan, yang saat ini per-Agustus sudah terakuisisi sebanyak 6.625 tenaga kerja pendamping desa dan 3000 tenaga kerja Bumdes. Kemudian kita juga kerja sama dengan Badan Pusat Estastistik dalam rangka penyediaan pemanfaatan serta pengembangan data dan informasi untuk mendukung program jaminan sosial tenaga kerja serta perstatistikan nasional. Kemudian bekerja sama dengan imigrasi yang bari saja kami tanda tangani dalam rangka untuk pemanfaatan data imigrasi dalam program jaminan sosial tenaga kerja sehingga para PMI yang akan melakukan daftar ulang tidak perlu balik ke Indonesia.

Mereka cukup bisa mendaftarkan dari negara penempatan yang mana semakin besar dari yang data kami miliki para PMI ini tidak membawa atau kelupaan membawa KTP atau NIK tetapi mereka selalu membawa pasport sehingga kita fasilitasi untuk bisa daftar menggunakan pasport dan kami harus berintegrasi sistem kami dengan imigrasi. Kemudian kerja sama dengan Kementerian Sosial dalam rangka perlindungan kepada SDM Program Keluarga Harapan (PKH). Kerja sama yang lain dengan BNI, Jiwasraya, Perhutani, kemudian dengan Koni dan sebagainya. Pada dasarnya semua untuk peningkatan kepesertaan. Saya tidak membacakan satu persatu jenis kerja sama tersebut, namun demikian pada prinsipnya bahwa kita atau BPJS Ketenagakerjaan akan terus menjalin kerja sama kolaborasi sinergitas dengan Kementerian Lembaga organisasi dalam rangka untuk peningkatan kepesertaan dan peningkatan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih *Wabillahi taufik hidayah.*

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Baik bapak ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerja dan juga Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerja. Di tangan saya sekarang sudah ada nama-nama anggota yang ingin mendalami dari paparan yang telah disampaikan. Saya mulai dari sisi kanan yaitu Bapak Nurmansyah dari Fraksi PDI Perjuangan. Silakan.

F-PDIP (NURMANSYAH E. TANJUNG, S.E.):

Terima kasih.

Pimpinan beserta Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Direksi BPJS yang saya hormati,
Beserta Dewan Pengawas yang saya hormati,
Beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini,

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua.

Saya sudah beberapa kali melalui Pimpinan mengikuti rapat dengar pendapat dengan Direksi BPJS maupun dengan Dewan Pengawas BPJS tetapi tidak pernah kita mendapatkan informasi yang *clear* begitu. Yang pertama dalam laporan atau pun yang dibacakan ini, itu hampir semuanya menjelaskan soal bagaimana soal kepesertaan, kemudian manfaat yang di dapatkan oleh para pekerja dan seterusnya dan seterusnya tetapi ada hal penting yang menurut saya kita harus juga tahu karena ini adalah amanah Undang-Undang dan saya yakin betul Pak Dirut ini paham betul karena beliau ini kan adalah mantan Bangkir pak ya paham benar soal rekayasa keuangan.

Nah saya hanya ingin menyoroti pak menyoroti soal investasi, karena kalau yang lain-lain saya pikir sudah sering kita bicarakan bagaimana soal masyarakat kita persepsinya terhadap BPJS Ketenagakerjaan itu masih sangat rendah. Itu sudah kita buktikan dengan beberapa kali sosialisasi dengan BPJS Ketenagakerjaan ini ya hanya beberapa kali itu hampir bisa dikatakan diatas 80% lah kalau kita presentasikan kita diatas 80% masyarakat kita itu belum paham tentang BPJS Ketenagakerjaan ini. Ketika kita bicara BPJS Ketenagakerjaan yang mereka tanya soal BPJS Kesehatan. Nah makannya saya tidak mau menyoroti itu karena itu prosesnya panjang. Saya ingin berbicara investasi, karena ini kan uang masuk terus. Berdasarkan Undang-Undang ini kan BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu kan harus memberikan laporan yang transparan.

Beberapa kali saya juga mendapat informasi dari Dewan Pengawas ini saya buka saja disini. Bahwa Dewan Direksi ini juga agak menutup-nutupi memberikan data

dan informasi katanya ke Dewan Pengawas, kita konfirmasi saja sekarang ini. Jadi kita ingin tahu misalnya yang investasi di deposito. Di Bank apa saja ini di investasikan, berapa pendapatan investasi pendapatan dari investasi. Kemudian kalau misalnya di saham perusahaan apa saja ini. Nah saya perlu melalui Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan saya mau mengusulkan untuk kalangan terbatas kita minta lokbooknya agar kita tahu berapa sebenarnya yang di investasikan. Dimana saja berapa pendapatan investasi sehingga kita mendapatkan informasi yang benar. Nah dari, ya kalau begitu dicatat Pimpinan saya mengusulkan kita minta lokbooknya supaya kita tahu seperti apa pengelolaan investasi.

Karena memang ini kuncinya BPJS Ketenagakerjaan ini di investasi beda sama BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan kita ini memang sudah pusinglah setiap hari menghadapinya, nah itu satu. Kemudian yang kedua ini berdasarkan catatan kinerja dari Dewas bahwa hasil investasi di DJS per-Agustus 2018 relatif rendah ini kenapa. Mungkin direksi juga bisa menjawab dan Dewan Pengawas juga bisa memberikan penjelasan, di khawatirkan tidak memenuhi renstra. Ini bisa juga nanti saya khawatir di kaitkan lagi dengan situasi ekonomi global. Pasti ada memang pengaruhnya tetapi saya ingin tahu kenapa ini bisa seperti ini. Kemudian soal kinerja SDM dan umum ini. Ini mengganggu juga pak bahwa ada anak-anak perusahaan yang dikelola secara amatir begitu.

Kita ini sudah bukan lagi astek apa namanya Jamsostek apalagi Astek, kita ini sudah bapak-bapak ini sekarang ini sebenarnya adalah sebagai sudah bertanggung jawab sebagai pelaksana, pelaksana dari Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional jadi berbeda. Nah saya ingin tahu seperti apa, kenapa masih bisa seperti itu. Karena kalau saya dulu masih ini masih astek atau Jamsostek saya sangat pahami bagaimana perilaku-perilaku KKN di Atek dan Jamsostek itu. Bahkan ini bisa dijadikan sebagai bancakan, kita ini sudah menjadi rahasia umum saya pikir. Jadi saya ingin ingin tahu Pimpinan supaya dalam rapat-rapat berikutnya kita supaya bisa lebih bagus lagi dan lebih *clear* begitu informasi yang kita terima. Bahkan saya juga ingin mengusulkan misalnya seperti Taspen.

Taspen itu apa ada gunanya, kenapa tidak di gabung saja Taspen dengan ke BPJS, karena sama-sama melindungi para pekerja. Bedanya Pegawai Negeri tetapi itu selanjutnya. Itu kan kalau pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan seperti ini ya kita khawatir juga. Misalnya ada lagi seperti Asabri ya, itu kan bisa digabung sebenarnya. Jadi saya pikir itu Pimpinan dan saya juga mengusulkan kalau memang ini tidak bisa di jawab atau pun di *clear* kan dengan baik saya tidak setuju kalau kita ambil kesimpulan dalam rapat hari ini. Kita pending dulu, karena harus sudah beberapa kali bahkan dulu saya pernah minta laporan keuangan melalui kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini. Itu kan memang laporan berdasarkan dari BPK itu WTP tetapi ada 16 catatan pak, 16 catatan di internal 16 catatan di internal nah saya minta pak minta penjelasan dari Dewan Pengawas apa yang bapak awasi dari catatan itu, seperti apa penjelasannya. Boleh dilanjutkan lagi nanti Pimpinan, saya pikir cukup ya mungkin nanti teman-teman yang lain bisa mendalami lagi. Terima kasih. *Wabillahi taufik hidayah*

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik. Memang kalau tidak di kasih kesimpulan kenapa, kan tidak apa-apa BPJS-nya memang tidak apa tetapi harus di kejar pak kalau memang mau begitu modelnya ya harus tegas. Sebelah kiri dari kiri Ibu Elva Hartati PDI Perjuangan lagi. Ini malah justru Partai Pemerintah ini yang keras kayaknya. Silakan.

F-PDIP (Dra. ELVA HARTATI, S.IP., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan beserta teman-teman Komisi IX yang saya hormati,
Para Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang saya hormati,
Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajarannya,

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh
Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua.

Menindak lanjuti apa yang dikatakan oleh rekan saya Nurmansyah bahwasannya penjelasan dari Dewas tadi bahwa target hasil investasi bisa tidak tercapai pada tahun 2018. Kenapa tidak tercapai ini, apakah ini berbentuk sahamkah, apakah berbentuk obligasi mohon penjelasannya. Selanjutnya dalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja setiap pekerja seharusnya dapat menerima perlindungan secara maksimal dari BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini pemerintah sedang menggalakan berbagai pelatihan ketenagakerjaan ternasuk pada program jaminan sosial untuk nelayan dan perikanan. Pertanyaan saya bagaimana perlindungan para nelayan dan perikanan ini dan bagaimana pula perlindungan pada pembangunan Balai Pelatihan Kerja Komunitas. Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan dalam menjamin perlindungan para tenaga kerja ini.

Selanjutnya tentang pekerja migran Indonesia, paparan Dewas tadi bahwasannya dalam menilai kinerja kepesertaan dari PMI Agustus 0,31 juta atau 310.470 jiwa. Yang melalui sisko TKRN BNP2TKI bagaimana mekanisme perlindungan tersebut termasuk iuran klaimnya dalam sistem tersebut. Hingga saat ini Kemenaker belum menerbitkan Permenaker terkait hal tersebut. Sejauh mana kordinasinya dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu saja Ketua.. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik. Berikutnya sebelah kanan Bapak Mafirion.

F-PKB (H.MAFIRION):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan serta Anggota Komisi IX,
Yang saya hormati Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajarannya,

Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Dewas BPJS Ketenagakerjaan **...(rekaman terputus)** yang kemudian mencapai reestranya pencapaian sesuai reestranya yang lainnya tidak mencapai semuanya tidak mencapai restra. Kalau ini di analogikan seperti BPJS Kesehatan yang peputaran uangnya beban iuran sama tingginya dengan beban yang digunakan serta, ini perusahaan sama saja nasibnya ini perusahaan bangkrut juga. Bayangkan saya bahwa angkanya angkatan kerja kita 121 juta, pekerja penerima upah itu ada 42 juta, pekerja tidak penerima upah itu 72 juta. Kalau pesertanya totalnya kepesertaan BPJS itu cuma 28 juta , itu artinya cuma 23%, 23% kepesertaannya. Benar pada uang angka-angka baik likuid tetapi harapan jangka panjang kita bahwa pekerja kita terlindungi dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, tidak dan ini perlu dilakukan evaluasi.

Makannya saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Guntur tentang penambahan manfaat, itu kiranya perlu menjadi bagian yang harus di pikirkan. Yang kedua apa yang ditanyakan rekan saya terdahulu Nurman Tanjung dan Ibu Elva perlu menjadi pikiran kita dan BPJS harus menjelaskan kepada kita, dana investasi itu seberapa besar dan seberapa besar keuntungan dari dana investasi itu. Karena dari situ nanti kita akan kembali melakukan perhitungan apakah kita akan menambah manfaat bagi peserta ini. Jadi kalau umpamanya Pak Agus Bangkir disini bukan perhitungan laba yang harus diperlukan. Bukan perusahaan BPJS Ketenagakerjaan ini menimbun uang sebanyak-banyaknya tetapi pembayar iuran mendapatkan manfaat yang besar dari bagian dia memberikan iuran kepada pekerjanya. Saya juga mendengar kemarin teman-teman BPJS Ketenagakerjaan di undang FGD-nya jaminan sosial saya senang itu kalau BPJS Ketenagakerjaan ikut serta dalam jaminan sosial bagi pekerja kita.

Sehingga pekerja kita ini tidak menjadi orang yang baperan, pekerja kita ini kan baperan. Kalau ada tenaga kerja asing dia ini iya karena kita tidak memikirkan mereka secara baik. Mereka adalah pekerja 62% pekerja-pekerja kita tidak tamat SD, tidak tamat SMP dan tidak tamat SMA. Kalau sudah itu berarti mereka pekerja kasar pekerja yang tidak punya skill yang baik, yang tidak mungkin akan bersaing di masa depan. Kalau dia pelinting rokok sepanjang hayat hidupnya pelinting rokok, kalau dia penjahit lurus sepanjang hidupnya menjadi penjahit yang garis lurus. Kita mau dia berubah dia tidak pelinting rokok lagi, dia mungkin jadi mandor pelinting rokok, dia jadi apa berubah menjadi perancang busana yang baik. Nah perubahan-perubahan itu harus menjadi bagian yang di pikirkan BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi saya kalau umpunya BPJS Ketenagakerjaan menceritakan kepada kita bahwa BPJS Ketenagakerjaan punya uang 400 triliun umpunya, saya tidak bangga karena pekerja-pekerja kita tidak berubah. Jadi itu harus menjadi bagian yang di pikirkan. Nah saya meminta penjelasan baik dari Dewan Pengawas dan Direksi apa yang harus dilakukan dengan buku yang setebal ini hanya satu lembar yang punya nilai baik, lembar yang lain tidak punya nilai baik ini ini buku. Ini sama dengan bukunya BPJS Kesehatan yang rugi 16 triliun itu sama. Cuma bapak-bapak tidak punya beban sebesar mereka karena pensiun ada waktunya, orang tua ada waktunya kan BPJS Ketenagakerjaan ini hanya ini bahwa orang bekerja dia kecelakaan, dia tua dan dia pensiun.

Beda sama BPJS Kesehatan setiap hari orang sakit, sakitnya berubah lalu ada rujuk kembali, di tempat bapak tidak ada rujuk kembali. Jadi saya tidak bangga misalnya Pak Guntur menyebutkan bahwa kita punya uang 340 triliun tidak bangga. bapak lihat keluar bapak pergi keluar, itu yang pertama. Yang kedua bahwa BPJS kalau kondisinya seperti ini dengan 121 angkatan juta angkatan kerja dan bapak punya 28 juta kepesertaan saya juga tidak merasa bahwa wah kerja keras, tidak. Karena saya ini kan mitranya bapak, saya sudah menjalankan kemitraan bapak ini sosialisasi di beberapa tempat dan mereka. Oh bapak datang dari BPJS Kesehatan ya saya bilang tidak. Makannya waktu saya dapat satu tempat yang membanggakan saya namanya sialang indah bahwa di desa itu 80% sampai 91% warganya BPJS Ketenagakerja anggota, petani semua oh itu saya bangga.

Gedungnya dia bikin BPJS Ketenagakerja saya itu saya share di IG saya karena saya bangga maunya seperti itu, maunya seperti itu tetapi daerah lain tidak. Bukan orang desa tidak mengerti pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, bukan. Karena memang sosialisasi itu tidak ada. Jadi itu harus menjadi bagian yang di pikirkan selain perisai perisai itu. Perisai itu juga penting kalau bapak hanya untuk mengkolleg iuran, mengajak orang menjadi anggota itu mungkin penting tetapi yang lebih penting memberi kesadaran bahwa yang empat tadi. Bahwa orang akan tidak bekerja ini bekerja. Sakit, pensiun, tua dan itu harus di ceritakan mengapa pentingnya uang 25.00 satu bulan ini, karena bapak akan menghadapi empat fase ini di masa depan. Jadi itu tetapi tadi kita memang sangat perlu Ketua bahwa kita mau BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan kepada kita.

Pertama berapa besar dana BPJS ini yang di investasikan di berbagai sektor. Yang kedua itu berapa pendapatannya setiap tahunnya. Itu kita perlu itu melihat supaya pertama keinginan pemerintah memberikan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia, yang kedua kita mau tahu seperti apa pengembangannya kedepan. Yang terakhir bahwa memang BPJS harus meningkatkan kepesertaannya. Kalau kita melihat komposisinya disini berat bagi BPJS hanya 28 juta 23% kecil sekali dari yang bekerja. Kita mau angka ini paling tidak di angka (...) 43%. Kalau melihat bahwa penerima BPI adalah 92 juta seluruh keseluruhan dari 260 juta Indonesia ada 100 juta orang lebih yang bisa di ajak untuk ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tetapi BPJS Ketenagakerjaan harus memperluas manfaatnya tidak hanya itu saja tetapi mungkin yang lain sehingga masyarakat menjadi tertarik.

Yang kedua soal PMI (Pekerja Migran Indonesia). Saya tidak melihat kerja sama yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan ini dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya itu sudah 3 tahun itu melihat kenapa hubungan ini tidak begitu baik, harmonis tetapi tidak baik dan saya pun sampai hari ini bertanya-tanya bagaimana si hubungan BPJS Ketenagakerjaan ini dengan Kementerian Tenaga Kerja. Apa hanya mitra saja, apa hanya waktu kik and properties saja bahwa kemudian Menteri Tenaga Kerjanya menjadi bagian terpenting untuk mengangkat Direksi dan Dewan Pengawas, karena kami melihat dari paparannya Pak Agus sebagai Direktur Utama ini hanya mitra biasa saja. Padahal disana kuncinya disana kuncinya ketenagakerjaan itu. Kenapa hanya seperti ini saja, seperti orang yang baru kenal saja. Ini kan seperti orang yang kenal-kenal biasa saja.

Menjadi bagian kerja sama, itu pun namanya itu yang terakhir-akhir. Jangan-jangan memang tidak ada hubungan sama sekali kan kan Lembaga-Lembaga kita ini di bangun oleh negara ini selalu pendekatannya kekuasaan, tidak mengerti historynya seperti apa. Jangan-jangan kalau sudah menjadi Lembaga karena di bawah Presiden ada yang di bawahnya tidak peduli begitu. Harusnya ini menjadi tempat yang penting untuk, karena pasti akan ada permen-permen yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Saya meminta ini Direksi menjelaskan kepada kita, dari dulu si waktu saya masih di Kementerian Ketenagakerjaan pun saya merasa oh seperti ini begitu atau bapak-bapak ini seperti kacang yang lupa kulitnya. Karena punya hubungan dengan Presiden Wakil Presiden tidak peduli dengan yang lain. Ini mohon ada penjelasan.

Selain penjelasan-penjelasan, kenapa buku ini seperti ini hanya satu bagian satu lembar buku ini yang menggembirakan yang lainnya tidak menggembirakan. Tolong di jelaskan secara rinci termasuk apa yang ditanyakan oleh teman saya Nurman Tanjung soal investasi. Berapa besar uang yang di investasikan, berapa pendapatannya setiap tahun sejak tahun 2015. Terima kasih. *Wabillahi taufik hidayah.*

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik. Berikutnya sebelah kiri Ibu Siti Masrifah dari PKB.

F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

Pimpinan yang saya hormati,
Seluruh sahabat-sahabat di Komisi IX,
Anggota Komisi IX yang saya hormati,

Direktur BPJS TK yang hadir dan seluruh jajaran Direksi yang hadir yang saya hormati,

Kemudian Dewas dan seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati dan banggakan,

Sudah ada tiga yang mengkritisi apa yang sudah disampaikan oleh baik Dewas maupun Direktur BPJS Ketenagakerjaan. Ada beberapa catatan yang saya akan kritisi di catatan kinerja Dewas yang telah di laporkan, di catatan kinerja Dewas disebutkan tentang kepesertaan PMI hanya ada 310.470. Padahal saya melihat disitu ada yang catatan lagi 1.822.587, itu yang pekerja mandiri PMI mandiri. Nah saya mau tanya itu, di awal disampaikan hanya kepesertaannya hanya 310 tetapi disisi lain tadi dicatatan 26,5 *plus* 2,1 juta itu termasuk bagian dari PMI mandiri. Nah saya tanya ini yang benar yang mana 310, 470 saja atau di *plus* 1.822.587. Yang peserta mandiri ini sudah benar ikut BPJS TK atau belum begitu ini pertanyaannya. Kalau memang tadi disampaikan yang mandiri tidak terdeteksi tidak termonitor kepesertaannya.

Catatannya yang termonitor seperti yang disampaikan oleh Bu Elva adalah mereka yang berangkatnya dari melalui BNP2TKI. Nah kalau begitu saya ingin tanya, tidak tahu ini pertanyaan kepada siapa nanti yang menjawab tetapi saya ingin tanya soal berapa si sebenarnya jumlah PMI dimasing-masing negara tujuan, karena saya tidak melihat yang ikut yang dilindungi oleh BPJS TK nah ada rinciannya berapa. Yang kedua apakah sudah ada perjanjian kerja atau perjanjian kerja sama dengan Kemenlu RI soal itu. Yang ketiga bagaimana setrategi BPJS TK untuk mengetahui kalau tadi memang masih simpang siur jumlahnya karena tidak terdeteksi yang mandiri PMI yang mandiri tadi. Apa kira-kira upaya yang mau dilakukan karena jumlahnya banyak tadi. Kalau hanya perkiraan saja 1.822.587 berarti itu kan banyak jumlah yang sangat banyak yang bisa kemudian itu ditarik untuk mendaftarkan sebagai PMI yang terdaftar sebagai BPJS TK begitu.

Nah dalam hal ini saya mau tanya juga premi yang di pakai itu preminya premi flet apa premi sesuai dengan apa yang berlaku di Indonesia, karena pepinya lagi di garap ya ini ya nah saya ingin tahu. Kalau toh nanti itu BPJS memegang tanggung jawab untuk BPJS TK-nya PMI itu nanti premi yang akan dimintakan kepada para pekerja PMI itu apa premi flet atau premi yang hitungan seperti yang ada di kita, berapa persen dari gaji misalnya begitu ini saya tanyakan nanti ya. Kemudian PMI yang mandiri pasti mereka ini dulunya pernah berangkat melalui PPTKIS terdahulu atau perusahaan-perusahaan swasta yang memberangkatkan mereka dulunya sebbelum rapi. Nah saya ingin tahu adakah upaya dari BPJS TK untuk mengajak kerja sama PPTKIS atau pun apa ya perusahaan swasta yang dulu pernah mengirim itu untuk merekrut mereka kembali agar ikut BPJS TK.

Kalau tidak soalnya saya melihat ada peraturan direksi catatan direksi itu soal itu ya itu saya tanyakan itu. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan di forum ini tadi disampaikan ada beberapa hal oleh BPJS TK termasuk dana yang dikelola yang nilainya 350 han triliun ya kalau tidak salah begitu. Dalam menjalankan empat program jaminan sosial yaitu jaminan hari tua, jaminan kerja, kematian dan pensiun yang hanya dapat diterima peserta maupun ahli waris peserta ketika terjadi peserta mengalami resiko tua, celaka, mati dan pensiun. Nah saya melihat ada beberapa

model orang kenapa tidak tergoda dengan BPJS TK. Padahal dana yang sedemikian rupa, sebenarnya kan orang masuk BPJS itu bagaikan orang menyimpan menabung sebenarnya begitu istilahnya.

Karena kalau BPJS Kesehatan tadi sudah disampaikan sampai rugi sekian triliun karena mereka uang itu cepat terpakai tetapi BPJS TK kan tadi ada batasan-batasan kecelakaan baru dapat di pakai, mati baru ada, pensiun baru ada dan lain-lain. Nah saya tanya apakah tidak sebaiknya BPJS TK ini membuat satu terobosan memberikan manfaat tambahan yang manfaatnya langsung kepada peserta. Untuk apa, untuk meningkatkan sistenebel kepesertaan dan juga brand powernis BPJS TK jangan sampai kalah dengan BPJS Kesehatan atau BPJS lain-lain. Bisa tidak si kira-kira misalnya BPJS TK ini memberikan manfaat yang sifatnya misalnya delibenefit kaya misalnya nanti kan tadi sudah disebutkan itu bentuknya sudah bisa barcod dan lain-lain. Ketika dia mau ke supermarket atau belanja dimana hanya di scan barcodnya kemudian ada manfaat dari BPJS TK.

Misalnya oh ada potongan 5% misalnya, oh ada potongan ya kan tetapi saya tidak tahu ini ada apa tidak sudah ada apa tidak ya saya lupa itu ya. Nah benar benar BPJS TK? Nanti di jawab ini ya. Saya ingin tahu itu saya soalnya tidak megang BPJS TK ini. Saya ingin tahu punya tidak manfaat itu begitu. Yang ketiga BPJS TK sesuai dengan amanat Undang-Undang harus hadir di seluruh Kabupaten di Indonesia. Saat ini jumlah kantor BPJS TK benar tidak ini pak saya informasinya hanya 324? Belum mencakup 514 Kabupaten yang ada di Indonesia, tolong nanti di jawab ya ini ya. Nah bagaimana BPJS TK memberikan pelayanan perlindungan ke daerah-daerah yang belum ada kantornya. Berarti kan ada selisoih itu 514 hanya ada 324 lumayan banyak. Nah kepada siapa begitu. Terakhir ini saya baca Dewas punya Dewas ini ada catatan-catatan.

Di catatan itu ada review rekomendasi Dewas yang tahun 2018 ada 36 rekom sampai September tetapi hanya ditindak lanjuti 50%. Saya tanya kira-kira kalau mau menindak lanjuti rekomendasi itu apa si yang di dahulukan kemudian sehingga ada di tahun 2017 misalnya 80% berarti 20% tidak di lanjutkan apa tidak di tindak lanjuti. Ini kan di Dewas ini saya melihat di beberapa halaman catatan dari tahun 2016, 2017, 2018 rekomendasinya memang tidak rekomendasi dari Dewas tidak sepenuhnya di tindak lanjuti. Tindak lanjuti ini saya tanya prioritasnya apa itu. Saya kira itu ada kegitan-kegiatan rutin. Nah hasil kegiatan rutin dari Dewas yang disini disebutkan ada beberapa menilai kewajaran perhitungan dan evaluasi cadangan teknis dan lain-lain kaya begitu ya.

Ada beberapa gambar ini yang disajikan, sampai sejauh mana hasil kegiatan rutin ini kemudian bisa menjadi bagian dari implementasi kebijakan yang dibuat oleh BPJS TK. Saya kira itu lain-lain tadi sudah di pertanyakan oleh teman-teman yang lain. Saya konsen terhadap PMI tadi ya. Teri kasih ya. *Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq.*

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

Nama saya Siti Masrifah Fraksi PKB Daerah Pemilihan Tangerang Raya Banten III.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Masih nyaleg lagi tidak bu? Bu masih nyaleg tidak? Makannya nyebut dapil itu loh. Yang berikutnya Bapak Ali Mahir. Silakan.

F-NASDEM (ALI MAHIR):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

Langsung saja saya juga tertarik di halaman 7, disitu tentang judulnya si Profil Pekerja Indonesia. Jadi total pekerja Indonesia fantastic 1 juta 121 juta luar biasa dan ini sebetulnya ladang basah ladang bagus kalau bisa di optimalkan. Nah ternyata angka ini baru yang penerima upah saja yang mestinya gampang digiring itu baru 26 koma sekian ya yang bukan penerima upah itu. Nah artinya bahwa jaminan hari tua, jaminan pesiun dan kecelakaan kerja atau kematian ini masih belum bisa merata untuk pekerja yang notabennya pekerja itu pekerja penerima upah itu sangat mudah bagi saya. Karena apa, kalau mau memajukan izin dan sebagainya ya alhamdulillah kebetulan saya dulu pengusaha kecil-kecilan itu yang namanya SIUP apa itu kan ada data-datanya. Data pekerja harus ada dong dari izin lokasi, dari. Ini mohon maaf Pimpinan agak sedikit ke teknis ya. Izin lokasi maupun izin usaha itu ada.

Ada jumlah peserta berapa mesin dan lain-lainnya. Nah dari peserta itu kalau ada kenaikan setiap bulan itu kita melaporkan maaf setiap tahun melaporkan sehingga jumlah pekerja penerima upah itu tahu meningkat setiap tahun gampangannya. Saya pikir itu jelas, saya ambil contoh saja kebetulan kalau tadi di katakan sangat minim di dapil saya alhamdulillah Kota Kudus itu pasti bagus. Bapak bisa melihat nanti diatas 50%, karena disana banyak pekerja penerima upah notabennya yang kerja pabrik-pabrik resmi pabrik-pabrik besar. Itu sudah pernah saya cek diatas 50 ini alhamdulillah. Cuma di kampung sebelah atau di Kabupaten sebelah seperti di Demark nanti bisa di cek itu sangat kurang.

Disana pekerja juga belum banyak banyak petani banyak sendiri. Nah yang saya ingin sedikit *sharing* itu kan memiliki mitra. Jadi mitra dalam arti ada kita bisa memakai ya bisa memakai seperti kejaksaan atau pun Dinas Tenaga Kerja. Makannya tadi Bang Mafirion mengatakan kurang harmonis kalau bisa tolong jangan. Karena kalau sudah menyangkut pelanggaran kita boleh memakai yang namanya kejaksaan misalkan di gandeng tidak ada masalah, karena bapak-bapak ini memiliki kekuatan hukum yang cukup saya pikir begitu. Jadi ini sangat fantastic kalau hanya dari 46 ko hanya 26 sekian ini separo. Sementara fasilitas yang harus ada yang sudah dimiliki itu sudah memadai, itu dulu satu. Nah yang kedua sedikit menyangkut kita tadi melihat data bahwa PMI (Pekerja Migran Indonesia) baik yang sudah menjadi peserta maupun yang belum.

Ini ternyata masih ada beberapa masalah contohnya saja contohnya. peraturan pemerintah yang nantinya akan dibuat tentang yang mengatur Undang-Undang 18 saya mungkin sedang di bahas kalau tidak salah. Saya mohon kalau bisa dimasukkan itu yang yang menyangkut dari PMI sendiri di perkuat peraturan pemerintahnya, karena jumlahnya cukup besar disini cukup gede ya jumlahnya dan pesertanya masih sedikit. Kenapa begitu, karena ini langsung menyangkut masukan masukan dan ini *income* besar nantinya kalau bisa dengan dari BPJS TK itu sendiri. Ini kan termasuk cukup jauh ya jaraknya yang kadang-kadang kurang di monitor begitu. Kalau bisa coba dengan adanya peraturan pelaksana ini nanti tolong bisa di kawal kalau memang itu bisa terlibat bahwa ini adalah *income* yang cukup besar untuk BPJS TK. Mungkin itu Pimpinan terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Pak Imam Suroso. Silakan.

F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H.,M.M.):

Iya terima kasih pak.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pak Ketua dan teman-teman Komisi IX,
Yang saya hormati untuk BPJS Ketenagakerjaan dan Dewas,

Jadi saya hanya ingin dijelaskan saja pak untuk capaian Dewan Pengawas itu adalah kepanjangan tangan dari pada Komisi IX. Beliau di seleksi feet and propes oleh Komisi IX. Nah sekarang pertanyaannya dari tahun 2016 itu rekomendasi dari BPJS dari pengawas 75% oke, tahun 2017 ada cuma 80% 3 (...) rekom. Nah di tahun 2018 itu hanya 50% di rekom 50%, pertanyaannya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa melorot sampai hanya 50%? Nanti mohon dijelaskan. Kemudian saya juga meminta dari Dewas nanti tolong disampaikan ke kita selaku yang punya kepanjangan tangan kendala-kendala apa di lapangan, kesulitan apa dan seterusnya yang sudah dialami yang kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bapak selaku kepanjangan tangan DPR RI karena DPR RI urusannya banyak sekali dengan Kementerian macam-macam.

Nanti sampaikan nanti disini kita luruskan jelas tidak ini kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan, jangan sampai kinerjanya pemborosan uang negara atau uang rakyat saja. Kemudian yang ini investasi tahun 2018 hanya 58,9%. Lah itu bagaimana itu, bagaimana bisa mengembangkan apa tidak apa menurun terus. Itu saja Pak Ketua

nanti tolong dijelaskan karena ini penting bagi kita semua Komisi IX. Terima kasih Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Silakan Pak Iqbal dari P3.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Iya terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi IX,
Yang saya hormati Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Ketua dan Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan saya hormati,

Kalau berbicara BPJS Tenaga Kerja ini kan agak berbeda ini dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu saat ini defisit tetapi kan BPJS Tenaga Kerja bisa kita katakan cukup bagus dalam keluar masuk kasnya cash flownya dan kemudian juga kita melihat disini kalau dari sisi dana jaminan sosial dari data yang kita terima dari Dewas itu cukup tinggi sekali dananya kemudian juga dana investasinya. Kemudian juga kalau berbicara tentang jaminan program jaminan yang untuk calon tenaga kerja kita atau TKI kita ini kan baru ini.....**(rekaman terputus)** asuransi kemudian membentuk kososium. Kemudian atas pertimbangan kita. Kita mengusulkan karena BPJS Tenaga Kerja itu sudah ada maka ke BPJS Ketenagakerja. Disini saya melihat dari halaman 8 ini pak, ini dari buku BPJS Tenaga Kerja itu saya melihat angkanya cukup lumayan besar juga untuk bagi calon TKI tahun 2018 itu sekitar 4 miliar ini.

Kemudian TKI juga cukup lumayan cukup banyak, artinya ada peningkatan baik itu kepesertaan maupun iuran yang dibayarkan oleh para TKI dan calon TKI. Nah kemudian berbicara tentang calon TKI disini ada catatan PMI masih berada di Indonesia dalam perlindungan masa pra paling lama 5 bulan. Kalau boleh saya bertanya pak ini program jaminan apa ini yang dibayarkan oleh calon TKI itu, biasanya kan biasanya mereka calon jaminan kecelakaan kerja dan kematian ya kalau tidak salah ya. Kemudian juga TKI-nya saya kira sama juga ya program itu juga yang diambil. Nah pertanyaan saya adalah yang pertama untuk calon TKI seandainya mereka itu tidak jadi berangkat itu uangnya bagaimana? Disini kan dalam masa perlindungan paling lama 5 bulan. Misalnya mereka mendata sebagai calon TKI, kemudian harus ikut BPJS karena ada aturannya.

Lalu mereka tidak jadi berangkat ini, nah itu bagaimana uangnya. Nah apakah dikembalikan ke calon TKI atau itu bisa tetap berada di BPJS lalu kalau berada di BPJS itu dikembalikan uang itu. Yang kedua tentang TKI, TKI yang berada di negara

penempatan. Disini banyak saya melihat ini ada dari Malaysia, Taiwan itu iurannya cukup besar. Nah jika yang mereka ambil itu adalah jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Seandainya pada waktu mereka disana kemudian mendapat musibah itu bagaimana BPJS bisa menanggulangnya. Apakah BPJS Tenaga Kerja sudah bekerja sama dengan asuransi di negara sana. Nah karena juga seperti di Taiwan itu itu kan belum ada perwakilan BPJS malah belum ada disana. Hal-hal seperti ini kan harus ada harus diperhatikan oleh BPJS.

Jangan kita memaksa calon TKI atau TKW itu harus membayar karena ada peraturannya peraturan Menteri tetapi kita seolah-olah ya seolah olah kita setelah itu kita mengabaikan. Nah karena waktu kita ke Taiwan itu atau kami kunjungan kesana kita tanyakan, ini bagaimana kalau seandainya terjadi kecelakaan disini. Mereka bekerja tidak bisa menjawab. Nah apakah mereka harus pulang ke Indonesia kan tidak mungkin. Nah kira-kira gambarannya seperti apa ini pak, kira-kira seperti apa. Karena pekerja kita kan bukan hanya di Taiwan saja di Malaysia ada juga. Apakah sudah ada kerja sama dengan asuransi setempat disana. Saya kira itu saja Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih.

Pak Ichsan masih ada? Cukup. Saya pak yang belum dari Fraksi saya.

Saya mau nanya sedikit saja pak. Ini pertama pertanyaan saya sudah betul belum ini data yang disampaikan oleh Dewas ini sama dengan yang disampaikan oleh Direksi BPJS. Jangan sampai laporan dari Dewasnya begini Direksinya beda. Kemudian data yang diperoleh oleh Dewas ini sebetulnya dari mana pak, berarti kan ngambil dari sini. Nah itu berarti tugasnya BPJS, Dewas itu apa. Kalau nerimanya langsung dari sini bulat-bulat lalu bapak presentasikan kepada kita berarti tugas Dewasnya itu apa, nanti bapak jelaskan supaya kita bisa melihat. Kemudian yang berikutnya saya mau tanya kepada Dewas pak, sistem pengawasannya seperti apa si sebetulnya Dewas ini, apa saja yang dilakukan. Malah saya melihat banyak kegiatan itu yang ke daerah juga kan sebetulnya Dewas itu melakukan supervisi dan lain sebagainya, nah pengawasan yang dilakukan itu apa.

Dari program yang bapak sampaikan tadi itu banyak sekali FGD-nya hampir semua program pengawasannya itu yang di ada empat komite tadi itu rata-rata kegiatannya malah justru FGD. Nah ini FGD ini sebetulnya pengawasannya seperti apa di dalam FGD itu. Karena kalau di dalam rapat-rapat seperti ini ya ini rapat ya hampir sama dengan FGD itu saya kira pengawasannya tidak maksimal juga. Karena kalau bapak undang Direksi atau yang stakholder terkait ya mereka akan paparkan yang mereka punya seperti apa adanya. Jadi kalau tidak mendetail itu itu kan tidak bisa juga itu. Kemudian yang berikutnya yang ditanya yang saya tanyakan soal dulu itu pak kepesertaan yang orang-orangnya tidak kelihatan lagi itu sekarang ini. Kan ada dulu seberapa itu orang itu yang orangnya sudah tidak ada tetapi uangnya masih ada disitu.

Dana apa istilahnya itu dulu? Dana tidak bertuan itu, besar itu. Itu bagaimana pak itu penggunaannya, dimana sekarang uangnya, digunakan untuk apa saja, kalau punya untung untuk apa. Kan perusahaan tidak boleh begitu, masa dapat untung dia dari dana yang tidak bertuan tidak sehat itu perusahaannya itu makruh. Ya tidak Pak Ilyas, agak makruhlah ya, makannya harus di pernjelas jangan sampai makruh jadi senang kalau yang markruh-makruh itu. Kemudian pak yang terakhir yang mau saya tanyakan soal aktifitas dari pada keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang konon kabarnya 165 triliun dari total anggaran 328 triliun tadi digunakan untuk atau di investasikan untuk infrastruktur, benar tidak pak? Ada kurang lebih 165 triliun. Nanti di jelaskanlah sama kita ini infrastruktur ini.

Karena belum tentu Partai saya setuju ini soal infrastruktur ini, karena di kampungnya Pak Amran sana minimal kampung Kakeknya Pak Amran itu limandailing sana tidak ada pak disana pembangunannya. Infrastruktur adanya disini. Ko tidak ada, banyak kampung disana, nanti daftar sana pak manusia banyak disana. Katanya ada bendungan, bendungan apa di kampung saya tidak ada itu. Ada kereta api, kereta api apa di kampung saya tidak ada kereta api. Orang disana lagi cari makan pak susah. Harga karet turun, ini bukan anu ini fakta itu bukan dapil saya itu kisaran itu kisaran bukan dapil saya. Tadi Pak Mafirion sudah bicara kan, ini saya dulu bicara ini kan belum selesai saya ini nanti bapak kalau mau bicara bicara lagi tidak apa-apa, ini kan lagi rapat formal ini. Ini direkam pak omongan saya ini, kemarin di tv juga saya kasih tahu "oh ini iklan ini iklan ini".

Mana di kampung saya tidak ada, maka belum tentu sebagai wakil sana saya setuju di investasikan infrastruktur pak. Bikin jalan tol, jalan tol apa mana ada di kampung saya jalan tol. Orang jalan biasa saja itu berlubang-lubang ada disana itu satu Kabupaten. Itu dulu namanya negeri sejuta pesona sekarang berubah jadi negeri sejuta lubang, coba bayangin. Karena jalannya rusak, nah ini yang begini-begini pak maksud saya itu. Tidak adil dong kan tetapi kan pekerjajanya ada di sana juga perkebunan sawit banyak disana pak. Berarti kalau semua PTPN yang ada disana semua pegawainya ikut menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja kan wajib pak tetapi bapak investasikan inrastrukturnya di daerah lain tidak adil bagi mereka yang peserta disana, betul tidak? Saya kejar juga ini yang begini begini mana keadilannya. Di kampung saya itu mulai dari Labuan Batu Raya sampai Labuan Batu Selatan kemudian tabak sel bagian selatan sampai ke perbatasan Riau itu semuanya PTPN pak.

Sawit-sawit semua pak milik negara rakyat disana tidak punta tanah tetapi pekerjaannya kan dari sana. Uang mereka kan digunakan juga untuk diambilah untuk ikut investasi disini tetapi pembangunannya tidak mereka rasakan begitu loh Pak Mafirion, di kasih tahu juga sama Pak Menteri Tenaga Kerja ini orangnya Menaker tadi makannya singgung-singgung dia soal itu. Nah saya ingin juga penjelasan soal itu sebetulnya soal sisi keadilan ini, karena kalau bapak tidak melaksanakan soal sisi keadilan itu melanggar Pancasila bukan Undang-Undang Dasar saja pak. Bukan hany melanggar Undang-Undang Dasar 1945 tetapi melanggar Pancasila sila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dapil saya itu silakan pak. Sekali-kali Pak Dirut nanti datanglah kesana ikut sama saya saya tunjukkan, begitu pak atau Pak

Dewas supaya bapak ikut menangis menengok masyarakat disana, serius pak bukan main-main.

Biar nanti kelihatan betapa susahya orang-orang disana, saya kira itu pak hal-hal yang ingin saya tanyakan nanti tolong di jawab. Nanti kalau belum bisa di jawab kita tanya lagi. Silakan pak dimulai dari mana dulu ini. Silakan dari Dewas.

DEWAS BPJS TK:

Baik. Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mungkin nanti ada beberapa rekan Dewas bisa menambahkan kalau di izinkan. Pertama Pak Nurmansyah dari PDIP menanyakan mengenai hasil investasi yang relatif rendah. Menurut persepsi Dewas, ini memang utamanya karena IHSG sampai saat ini setak (...) masih tidak beregerak signifikan begitu. Kemudian juga 50% dari dana investasi ini sesuai dengan peraturan OJK investasikan kepada SUN (Surat Utang Negara) dimana memang pendapatannya tetap. Jadi kita mengharapkan di sisa akhir tahun ini IHSG tumbuh kembali achivement investasi diharapkan bisa membaik, kalau tidak memang kita khawatir terus pak. Kemudian mengenai catatan-catatan auditor eksternal TBK OJK nanti Pak Safri dari perwakilan pemerintah bisa menjelaskan apa-apa yang menjadi konsen dan statusnya bagaimana. Kemudian Ibu Elva dari PDI juga, mengenai permenaker juga.

F-PDIP (NURMANSYAH E. TANJUNG, S.E.):

Sedikit Pak Pimpinan interupsi.

Yang saya tanyakan itu pak, itu bapak sudah tanyakan belum ke Direksi apa jawaban Direksi yang mereka sampaikan. Maksud saya kenapa sampai seperti ini dan ada ke khawatiran ke khawatiran bapak ini sudah bapak tanyakan belum ke direksi. Itu yang saya ingin minta ketegasan disini. Kemudian kalau bisa apa jawaban Direksi terhadap ke khawatiran bapak ini. Terima kasih.

DEWAS BPJS TK:

Baik. Di rapat gabungan selalu kita tanyakan pak tetapi nanti untuk memang dari sumbernya Direksi saya kira akan merespon mengenai hal-hal ini pak saya kira. Kalau boleh kami lanjutkan sebelum Bu Elva sudah hadir. Mengenai Pak Mafirion mengenai kepesertaannya pak, memang manfaat ini memang perlu dijelaskan kepada calon peserta BPJS TK. Pekerja kita masih sangat tidak mengerti mengenai manfaat BPJS TK dibandingkan BPJS Kesehatan tentunya. Edukasi yang masif dari dulu SD ada programnya program mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya tidak tahu apakah memang ini di tindak lanjuti di Kementerian Pendidikan tetapi dulu kalau tidak salah pernah ada pak ya kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memberikan kesadaran dari muda akan pentingnya jaminan sosial. Untuk Ibu Siti banyak pertanyaannya bu.

Pertama mengenai jumlah 1 juta 828 TK mandiri. Yang dimaksud TK mandiri disitu bukan PMI berangkat mandiri bu tetapi pekerja bukan penerima upah tenaga kerja mandiri. Jadi yang PMI-nya 310 memang ini ada sedikit perbedaan angka dengan Direksi, karena mungkin waktu penyampaiannya saja perkembangannya Direksi sedikit lebih besar itu maksud kami yang bekerja tanpa melalui proses BNP2TKI memang tidak terdeteksi oleh kita. Karena kami sistemnya terkait dengan sisko TKLN jadi orang berangkat ke Malaysia berapa jumlahnya tidak terlindungi tidak mendaftar BPJS TK ini yang memang tidak dapat kita jaring kalau memang sosialisasinya tidak masif. Kemudian pertanyaan mengenai jumlah PMI di negara tujuan barang kali nanti Direksi bisa menjawab.

Mengenai Pak Ali Mahir profil pekerja. Profil pekerja ini pak memang cukup besar 48 juta pak cuma ini memang klasifikasinya dari BPS barang kali kalau dilihat lagi pekerjaanya banyak yang di UKM menengah bawah, yang mungkin kemampuannya pekerja-pekerja yang perusahaannya menengah ke bawah jadi potensialnya memang dari sisi kepesertaan sangat minim tetapi memang kenyataannya penerapan PTSP pelayanan satu pintu di daerah ini sangat menjangkau kepesertaan melalui perusahaan-perusahaan yang harus melakukan perpanjangan izin tentunya. Kemudian Pak Imam Suroso *highlight*-nya capaian Dewan Pengawas rekomendasi di tahun 2018 masih rendah 50% memang ini posisi Agustus pak. Biasanya rekomendasi memerlukan waktu tergantung dari jenisnya sulit tidaknya atau memang kalau direksi tidak melaksanakan ya memang bisa terjadi juga.

Karena rekomendasi ini kalau di Undang-Undang kan saran nasihat pertimbangan. Jadi tidak ada yang sifatnya instruktif, jadi memang ini rekomendasi tetapi kalau terjadi hal-hal yang memang riskan tentunya Dewas telah memberikan rekomendasi sehingga akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Direksi. Kemudian mengenai kendala di lapangan apa yang diperlukan di tindak lanjut tentunya nanti dari Pak Safri bisa menyampaikan pak di lapangan, apa koordinasi. Utamanya kami merasakan peranan DJSN memang belum memberikan guidance yang lebih masif kepada kami khususnya dalam hal-hal sinergi aturan kemudian juga adanya masa depan BPJS terhadap penggabungan Taspen dan Asabri.

Ini memang kami seolah-olah bekerja tanpa ada guidance. Sementara itu juga posisi BPJS ini di bawah Presiden memang juga kami melihat terlalu jauh. Barang kali diperlukan satu level tingkat Menteri yang memang ditunjuk sebagai pembantu khusus untuk menangani BPJS yang ini sedang dilakukan penggodokan di tata kelola BPJS. Untuk pertanyaan Pak Iqbal saya kira nanti di jawab sepenuhnya oleh Direksi karena masalah operasional. Pak Saleh Daulay mengenai sistem pengawasan Dewas pak. Sistem pengawasan Dewas ini memang tugasnya adalah pengawasan jadi harus melakukan *faight fainding*. Kalau data memang kita satu pintu kita mengambil data informasi dari Direksi. Karena Direksi harus menjamin akses informasi kepada Dewas. Jadi investasi kepesertaan kami hanya satu pintu tidak melakukan sendiri perhitungan.

Dewas tidak punya instrumen untuk melakukan hal-hal tersebut tetapi *faight fainding* masalah apa-apa yang harus kita berikan saran itu merupakan tugas kami itu bisa kita lakukan melalui telaahan di pusat maupun *faight fainding* di daerah. Karena

memang kantor cabang kita lebih dari empat ratusan, ini yang memang harus dilakukan di daerah signa-signa di daerah seperti apa. Kemudian FGD adalah alat sebenarnya untuk pendalaman, temuan-temuan BPK kemudian aktuarial yang memang meragukan atau pun KAP yang harus kita tindak lanjuti dilakukan melalui suatu pertemuan yang intensif melalui FGD untuk menjadikan solusi dan disampaikan kepada Direksi tentunya sebagai saran dan pertimbangan Dewas. Saya kira itu sementara Pak Safri mungkin akan menambahkan dan mungkin Dewas lain silakan.

ANGGOTA DEWAS BPJS TK:

Terima kasih Pak Ketua Dewas.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan sidang,
Ibu Bapak Anggota Dewan yang terhormat,

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh
Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiatu.

Saya ingin menambahkan yang disebut Bapak Ketua Dewas. Pertama pak bahwa pemeriksaan terhadap BPJS itu ada eksternal auditor yang terdiri dari BPK, kemudian kantor akuntan publik, kemudian OJK. Sementara internal itu terdiri dari SPI dan Dewan Pengawas, itu di dalam Undang-Undang seperti itu pak Pak Pimpinan. Nah semua pemeriksaan itu harus ada temuannya pak harus kita tindak lanjuti dan kita Dewan Pengawas memetani satu satu itu pak kelemahan-kelemahan itu dan alhamdulillah pak saya tidak menyatakan bahwa kita sudah sempurna tetapi dalam setelah 2,5 tahun ini saya merasa cukup banyak pak. Kalau perlu saya sampaikan kepada Pak Pimpinan saya bekerja *full time* pak, saya biasa bekerja di BPK, BPKP 38 tahun yang sangat berat. Tidak ada apa-apanya pak, di BPJS saya masih bekerja lebih berat dari itu. Saya kebetulan Pimpinan Komite Anggaran Audit dan Aktuarial.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal, tadi dari Pak Nurmansyah. Ada dua disini pak dari BPK, dari BPK itu adalah pertama temuan yang menghasilkan opini pak temuan yang menghasilkan opini itu baru satu kali dilakukan oleh BPK. Karena memang karena memang mereka tenaga waktu dan terbatas saya pernah Pimpinan disana. Dia baru memeriksa kita satu kali untuk tahun buku 2016 diberikan hasilnya Februari 2017 Pak Mafirion. Jadi itu disitu ada 10 temuan yang saya catat pak, pertama denda atas tunggakan iuran. Ini memang dimintakan untuk diperbaiki, saya menyatakan pak tadinya pembagian piutang iuran ini itu tidak memenuhi standar akuntansi yang ada. Mereka membaginya adalah lancar, kurang lancar, macet dan kontigensi pak. Kita tidak pernah mengenal istilah kontigensi kita sekarang melakukan reklafikasi pak.

Kita ubah menjadi sesuatu yang sesuai dengan standar yang berlaku di dunia adalah piutang lancar, kurang lancar, diragukan dan macet pak. Dari situ kita bisa temukan pak berapa angka sebenarnya yang kita berhutang. Per 30 Juni pak tahun

2018, kami bisa berikan datanya kepada bapak pak. Piutang iuran kita itu 2,7 triliun dan 54% itu macet, ini angka yang cukup tinggi. Jadi tadi pak ya lancar, nol sampai 90 hari, kurang lancar 90 sampai 180 hari, diragukan 180 sampai dengan 365 garis miring 366 dan macet lebih dari 365 366. Itu 54% macet per 30 Juni pak. Piutang iuran dendanya pak lebih lagi pak, piutang dendanya itu angka pastinya saya tidak tahu tetapi macetnya itu 89%. Ini yang akan menjadi perhatian kita pak, kita berarti bahwa mereka itu yang dikenakan denda itu praktis mereka tidak mau bayar kenapa saya kena denda.

Itu sedang kita pikirkan apa perlu kita mengadakan amnesti seperti pajak. Ini perlu pak kita lakukan ini dan ini kita sedang berpikir terus dengan pihak Direksi dan tasfos mengenai piutang ini saya melihat langsung ke daerah-daerah pak kemajuannya cukup baik pak. Jadi kita bisa kita minta per 30 September ini ada angka baru lagi Pak Pimpinan. Nanti kita tutup bukan 31 Desember pak, kita tutup per 30 November nanti. Supaya kita punya waktu satu bulan untuk membersihkannya nanti. Kedua mengenai kepesertaan pak, tentu kepesertaan ini tadi sudah diberikan jawaban bahwa kita telah banyak kemajuan pak. Catatan makannya tadi disebut Pak Mafirion mungkin satu-satunya bahkan nilai *plus* pak ya cuma itu saja. Kemudian mengenai jangka waktu pembayaran klaim program JHT tentu sudah lebih baik sekarang pak jauh lebih baik.

Mengenai sonkronisasi peraturan Jamsosnas belum sesuai dengan rotmap DJSN. Kita nanti mungkin bisa dibantu dari teman-teman dari Direksi tetapi menurut pengamatan kami sudah berlangsung baik. Kemudian pengelolaan rekening belum tertib. Nah ini sama pak bapak mungkin masih ingat di pemerintahan kira-kira bercerita 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu banyak rekening liar istilahnya pak ya rekening liar. Ini juga kita melihat pak di divisi keuangan ini itu Deputi Keuangan, terlalu banyak rekening-rekening. Nah kalau rekening-rekening ada yang sudah tidak bergerak pak justru bisa menimbulkan sesuatu moral hazard pak. Jadi kita kan tidak tahu kita tidak pelihara. Saya meminta sekarang semua rekening-rekening tidak perlu lagi itu yang tidak bergerak hapus. Cukup kita perlu 10 saja pak tidak perlu banyak-banyak. Mau apa rekening kita terlalu banyak, ini yang sedang kita lakukan jadi ada kemajuan disitu pak.

Kemudian penambahan pekerjaan atas kontrak, ini biasanya kalau begini pak kita langsung perbaiki langsung pak di lapangan karena kalau tidak kita akan macet seterusnya. Penyusunan HPS pengadaan ini mengenai perekrutan SDM, ini masih menjadi masalah dan peraturan Direktus SDM umum hadir disini Pak Noval. Mungkin bisa menjelaskan, memang kalau menurut saya saya pribadi dan rasanya teman-teman di Dewas sama bahwa ini merupakan salah satu titik lemah yang harus kita perbaiki mengenai SDM. Kalau saya bilang SDM kita punya PR overnaid harus kita lakukan. Sebagai contoh misalnya kita terima kemarin 150.000 orang 150.000 yang mendaftar kita terima 460. Kalau saya sebagai pembeli oh saya pasti pilih yang terbaik 20 Universitas terbaik. Kenapa tidak, karena saya raja sebagai pembeli tetapi kenyataannya no.

Ini yang masih kita perlu tekankan *what is the problem* karena kita berada pada posisi tawar ya Pak Pimpinan biar begini, 150.000 saya bilang 460 sudah sepantasnya

saya mendapat yang terbaik. Kemudian berikutnya investasi, saya investasi bukan wilayah saya tadi Pak Ketua sudah sebutkan. Kebijakan investasi cat loss ada Pak Amran disini bisa menjelaskan. Kemudian pelaksanaan kerja sama pembayaran rumah sakit. Ini barang kali yang juga, barang kali pelayanan Pak Krisna yang mungkin tidak hadir pada hari ini. Saya ingin kepada tadi pertanyaan pak. Apa, kalau tidak salah dari Pimpinan, masalah-masalah apa yang Dewas lihat di daerah. Ini pertanyaan baik sekali pak bapak bilang tadi sudah sebutkan Dewas ini faight fainding, bukan hanya saya pak.

Komite yang di Pimpin oleh Bu Indah, komite yang di Pimpin oleh Pak Rekson itu juga dan komite oleh Pak Aditiya selalu kita ke daerah pak ada jadwal resmi kita dari pihak kami pak karena kan saya kebetulan anggaran dan audit saya menemukan beberapa hal pak. Saya sebutkan tadi pertama yang paling tinggi menurut saya prioritasnya adalah manajemen SDM. Jadi Pak Pimpinan manajemen SDM ini apa artinya, bahwa perputaran orang di daerah itu ada bapak mengerti bus ALS pak? Antar lintas Sumatera atau ALS (Antar Lintas Sulawesi) putarnya disitu-situ saja pak. Kemudian yang kedua ada beberapa tempat yang masih dibiarkan kosong berbulan-bulan, tidak boleh Pimpinan ini tidak boleh ada.

Kemudian juga teman-teman di daerah itu mendapatkan kesempatan pelatihan kan perlu pak, semua sama derajatnya antara orang di Jakarta sama orang di Ternate harusnya sama mendapatkan kesempatan pendidikan dan ini banyak yang tidak kita temukan. Kemudian hutang iuran dan denda yang tadi pak, alhamdulillah kita perbaiki sama juga saya berani bercerita kepada bapak di tahun pertama periodenya Pak Agus Susanto kita bikin giant lift kita melakukan infentarisasi aset pak Pimpinan, yang sesuatu yang tidak pernah dilakukan sejak zamannya astek 40 tahun. Angka-angka yang ada di neraca itu adalah angka kira-kira hanya Allah SWT yang tahu. Sekarang kita sudah lakukan pak, kita tahu persis berapa aset saya.

Di setiap kantor semuanya di ruangan ada DIR (Daftar Inventaris Ruangan) Pak Pimpinan. Lengkap kita bersihkan yang tidak sesuai dengan aturan kita lelang selesaikan. Dengan hanya biaya yang 15 miliar tersedikit dalam BUMN, saya berani jamin kepada bapak-bapak selesai kita pak dalam waktu 10 bulan dan itu ada dampaknya ke arsip dampaknya kemana begitu pak lebih bagus lagi, jadi di ini kita melakukan itu. Kemudian yang kita juga lakukan adalah menyangkut masalah pengadaan, pengadaan juga suatu *problem* bapak tahulah 85% kasus di Kuningan itu kan pengadaan. Kita juga mau berhati-hati pak pengadaan ini, tidak bisa ini ada hal yang berlaku seperti kartel-kartel seperti itu. Kenapa lama-lama, kita perlu tahu ini ada apa....**(rekaman terputus)** Sakit keras, kalau ada Kepala Kantor tidak bisa melakukan pengadaan tanah dan bangunan sudah dilimpahkan kepada dia non job berarti dia tidak pantas menjadi Kepala Kantor.

Kemudian yang ketiga adalah masalah IT pak. Ini IT masih perlu kita perbaiki, memang kita datang juga di wariskan suatu sistem yang (...) juga terlambat mempunyai masalah. Ibaratnya Pak Agus Susanto itu datang dengan beban, sekarang pun beliau tertatih-tatih. Kita belum sempurna pak mengenai IT tetapi Insya Allah kita kawal terus, karena kita tahu bahwa IT itu adalah back bound dari organisasi yang modern seperti BPJS Ketenagakerjaan ini Insya Allah seperti itu. Kemudian yang

terakhir pak mengenai kegiatan komite tadi disebutkan bapak tadi tanya FGD saya tambahkan apa yang disebutkan oleh Pak Ketua. Jadi sebenarnya begini pak FGD, misalnya saya lagi memeriksa piutang. Saya ingin tahu karakter piutang itu di teman-teman di BUMN itu seperti apa. Jadi kami undang pak dari Bank, kami undang dari Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan FGD paling banyak 16 orang mereka harus satu level, pertanyaan paling banyak dua pertanyaan. Jadi kita melakukan itu pak dan akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang menjadi proses levendorn buat kami itu yang menjadi kami dasar untuk mengambil kebijakan-kebijakan perbaikan. Saya rasa itu pak. Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

F-PKB (H.MAFIRION):

Pimpinan izin Pimpinan interupsi Pimpinan.

ANGGOTA DEWAS BPJS TK:

Satu lagi tambahan kepada Pak Nurmansyah. Dari temuan satu lagi pak mengenai pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI pak tahun 2016 – 2017 mengenai investasi aset tetap dan beban. Dari 17 temuan Pak Nurmansyah kami sudah melakukan 14 pak sudah kami lakukan tindak lanjutnya 14. Nanti kalau memerlukannya kami akan kirim ke bapak. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Baik sebelum dilanjutkan perpanjangan dulu, tadi kan janjinya jam 16.00 WIB Sekarang 16.16 WIB. Kita perpanjangan 15 menit ya. Setuju? Kalau 15 menit Pak Mafirion jangan panjang-panjang bicaranya.

ANGGOTA:

30 dong.

KETUA RAPAT:

Yasudah berarti perpanjangan berapa?

ANGGOTA:

30 menit.

KETUA RAPAT:

30 menit

(Rapat Setuju)

Baik silakan Pak Mafirion.

F-PKB (H.MAFIRION):

Terima kasih.

Interupsi Pimpinan.

Tadi dijelaskan soal yang macet itu 2,7 triliun, 1,5 triliun itu macetnya diatas 365 hari 1,5 triliun 54% itu sekitar 1,5 triliun. Saya minta profilnya 1,5 triliun itu siapa saja mereka begitu penerima upah tidak penerima upah. Kemudian yang 1,2 triliun itu bagaimana statusnya lancar atau apa itu kira-kira seperti apa menariknya itu dan kapan bisa selesainya. Yang lainnya saya menambahkan saja Ketua, tadi senang saya mendengarnya ALS itu tetapi ALS itu ada istilah lain juga asalau sega asal jangan kita memakai istilah itu asalalau sega, jangan sampai jalan kemana-mana rusak semua kan itu kan asalau sega tetapi ALS sebenarnya bagus itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau ALS bagus semua pak dan itu pencemaran nama baik ALS tetapi kalau mau menanggapi itu kan asal jalan rusak maksudnya itu begitu yang penting ada namanya tetapi rusak untuk apa. Mau ditanggapi tidak pak?

ANGGOTA DEWAS BPJS TK:

Terima kasih Pak Pimpinan.

Pak Mafirion yang saya hormati.

Menganai piutang itu betul pak 1,5 triliun itu per 30 Juni. Saya jawab dulu pertama yang 1,2 triliun itu terdiri dari 3 tadi pak ada yang di lancar, ada yang di kurang lancar dan ada yang diragukan. Nah ini begini kan dia kalau misalnya per 30 September kita lakukan lagi opname, yang diragukan ini kan punya mutasi dua pak penambahan dia bisa dapat dari yang kurang lancar nambah ke dia atau yang dikurangi dari dia kurang kepada macet begitu saja sederhana matematikanya pertama. Itu kita kejar terus pak, kita bahkan dengan kebijakan di Direksi sekarang kita sudah pilah yang mana dilakukan oleh bagian keuangan penagihannya, yang mana dilakukan oleh waslik petugas kita pak pengawas (...). Nah yang jadi persoalan sekarang yang macet pak, macet nanti akan ada aturannya pak sesuai dengan peraturan dari DJKN nanti kita akan sampaikan kepada JKN.

Kalau JKN setuju pak itu akan dihapuskan. Pertama-tama di hapus bukukan, kedua dia dihapus tagihkan. Kalau di hapus bukukan itu dengan persetujuan Direksi, kalau dihapus tagihkan dengan persetujuan Direksi *plus* Dewas, itu sesuai dengan Undang-Undang yang ada pak. Nah 1,5 tahun ini profilnya bagaimana tadi ditanya begitu pak ya 1,5. Saya tidak hafal pak tetapi saya bisa *support* bapak datanya karena ini hasil yang luar biasa dari teman-teman dari Direksi pak. Baru satu kali ini 5 divisi yang terkait sama angkanya pak sama satu-satu itu pak. Kita paksa mereka sama sekarang, nah dengan jangka itu saya jadi yakin. Saya hanya tahu profil perdaerah, boleh saya beritahu pak Pak Mafirion? Yang paling tinggi adalah Sumbasel, nomor dua Sulama, nomor tiga Jawa Timur. Begitu saja pak.

KETUA RAPAT:

Baik. Ya ini yang terkait dengan apa pak? Silakan.

PEMERINTAH BPJS TK:

Terima kasih Pak Pimpinan Komisi IX.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

Saya hanya untuk mempersatukan penafsiran saja tentang angka, tentang data statistik. Jadi data statistik angkatan kerja itu 112 juta itu tidak bisa sepenuhnya menjadi peserta BPJS. Jadi tidak boleh ada 112 juta disini, kenapa hanya bisa dapat 48 juta? Karena data statistik itu ukuran angkatan kerja itu adalah 15 tahun sampai 65 tahun. Peserta BPJS itu adalah yang sudah punya KTP sampai usia pensiun 56 tahun. Jadi ada puluhan juta yang tersisir, karena data statistik secara internasional memang harus mulai dari umur 15 tahun.

F-PKB (H.MAFIRION):

Pimpinan interupsi.

Salah ini Bang Rekson, ini angkatan kerja itu yang bekerja penerima upah itu 48 juta, anggotanya abang itu cuma 26 juta itu ada selisihnya jangan abang melihat 121 juta. Yang saya tanyakan angkatan kerja itu totalnya 121, penerima upah 48 juta. Anggota BPJS itu dari 48 itu cuma 26, tidak penerima upah itu 2,1 juta.. Padahal yang 72 itu kalau di bagi lagi itu yang mandiriya itu gede ada 6 juta 7 juta. Jadi abang jangan salah menanggapi jangan salahin statistik salahin saja Direksi yang kerja ini angkanya seperti ini.

ANGGOTA DEWAS TK:

Bukan. Jadi sebenarnya saya bukan menyalahkan bapak juga cuma untuk pengertiannya, karena yang di asumsikan itu juga termasuk ASN, Abri, Polisi, Nelayan

yang semuanya tidak bisa masuk BPJS Ketenagakerjaan. Karena peta jalannya sesuai dengan Bapenas target kami tahun ini adalah 29 juta pak. Jadi kita sejak awal kami Dewas dan Direksi apa yang di amanatkan peraturan peta jalan kepesertaan itu masih sesuai dengan apa yang diminta pemerintah. Walaupun kami memang tidak sabar kami memang melewati angka yang disajikan oleh pemerintah. Jadi sampai nanti tahun kami selesai tahun 2021 Februari kami berjanji semua data yang diminta pemerintah kami cakup 48 juta peserta itu kebijakan kami dapatkan. Karena memang dengan adanya beberapa peraturan-peraturan yang tumpang tindih termasuk pengambilan JHT nelayan diambil.

ASN tidak masuk jadinya seharusnya masuk tahun 2015, kami sebenarnya bisa menjadikan itu equis untuk mengurangi target tetapi kami tidak melakukannya kami tetap sesuai dengan apa yang di targetkan oleh Bapenas. Sebagai tambahan saja pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke. Saya kira cukup dulu Dewas. Nanti tanggung jawab BPJS apa Direksi tidak di jawab malah. Nanti kalau ada yang telah Direksi bicara ada yang kurang dari Dewas kita persilakan. Sebetulnya boleh saja terbuka saja pak, kita kasih kesempatan dulu. Direksi senang dong kalau di Dewas semua yang menjawab ini. Iya silakan Pak Agus.

DIRUT BPJS (AGUS SUSANTO):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi telah tadi sudah disampaikan oleh Pak Arikson tentang data profil pekerja Indonesia, tadi tim kita sudah bekerja sama dengan Bapenas untuk menyisir angka-angka tersebut. Dari 120 1 juta setelah di keluarkan PNS, TNI, Polri. Kemudian tadi aspek umur berapa si sebetulnya yang menjadi cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan itu di dapatkan angka 78 juta. Dari 78 juta yang semestinya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan telah terdaftar sebanyak 47,8 juta atau sekitar 60%. Kemudian peserta yang aktif adalah 28 juta, artinya ada 32% dan dari total tenaga kerja aktif ini ada yang tidak aktif, nah ini yang yang tadi oleh Pimpinan apakah itu menjadi dana tidak bertuan. Jadi kami tegaskan disini bahwa tidak ada dana tidak bertuan tetapi dananya ada tuannya hanya tuannya belum datang untuk mengambil. Kemudian untuk.

F-PKB (H.MAFIRION):

Pimpinan interupsi.

Ini untuk pengingat kita, untuk pengingat kita sama-sama diruangan ini. Jangan ketika BPJS Tenaga Kerja pemerintah mengeluarkan angkanya seperti yang Pak Agus kasih tahu tetapi ketika BPJS Kesehatan beda, nah ini hati-hati ya hati-hati ini kita ingat. Kalau alasannya TNI Polri itu berapa si jumlahnya ASN itu berapa

jumlahnya. Nah ini hati-hati kalau 78 juta, karena PBI kita saja 91 juta 92 juta. Nah jadi hati-hati ini statistik jangan nanti disini beda angkanya sama disini ini perlu kita *clearkan* ini untuk kita Ketua dan kita tidak bisa menerima begitu saja, jangan ini. Terima kasih.

DIRUT BPJS (AGUS SUSANTO):

Iya baik terima kasih masukannya Pak Mafirion. Untuk pendaftaran PMI itu bisa dilakukan melalui kanal-kanal kita, baik itu di cabang, kemudian di kanal elektronik, kemudian melalui BNP2TKI dengan menggunakan sisko TKLN. Dengan kordinasi dengan luar negeri saat ini kita sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Luar Negeri untuk membuat suatu kerja sama atau MoU. Saat ini yang sudah kita lakukan kita melakukan kerja sama dengan Kedutaan Besar Negara Penempatan dan atau Kongen dari negara penempatan. Namun demikian kalau kita harus melakukan kerja sama dengan masing-masing negara penempatan satu persatu dari Kedutaan tersebut kita sedang mempersiapkan kerja sama sebagai payungnya yaitu dengan Kementerian Luar Negeri namun hingga saat ini belum selesai. Untuk perlindungan kepada nelayan saya kira nanti dari Direktur Kepesertaan Pak Ilyas bisa menambahkan hal ini.

Kemudian hubungan kerja dengan Kementerian, ya betul BPJS Ketenagakerjaan ini harus berkordinasi dengan Kementerian teknis. Kementerian Teknisnya adalah Kemenaker dan saya kira dengan Kemenaker itu hubungannya sangat erat sekali hampir berapa hari tim kita selalu bekerja melakukan pembahasan-pembahasan duduk bersama dengan tim dari Kementerian Ketenagaan Kerja. Kemudian yang saat ini sedang kita upayakan adalah bagaimana peningkatan manfaat kepada para peserta tersebut. Salah satunya tadi ditanyakan mengenai apakah ada manfaat langsung dari Ibu Siti.

Iya kita telah memberikan suatu manfaat langsung diantaranya untuk meringankan beban pengeluaran sehari-hari yaitu dalam bentuk memberikan discount apabila belanja di merchant-merchant yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini kita telah bekerja sama dengan sekitar 600 merchant bu dan ini akan kita tingkatkan terus sehingga bisa membantu para peserta kita pekerja kita meringankan beban kehidupan sehari-hari dan kerja sama ini kita utamakan untuk belanja kehidupan sehari-hari seperti beras, alat makan, kemudian sabun dan sebagainya. Kita sudah mengembangkan suatu fasilitas kartu elektronik dengan barcode tentunya ini sedang kita tingkatkan juga untuk mempermudah pada saat mereka belanja dan mendapatkan discount.

Selain itu juga ada manfaat layanan tambahan dalam bentuk fasilitas mendapatkan kredit KPR dengan tingkat suku bunga dan uang muka yang rendah. Kemudian peningkatan kompetensi dan training ini juga sedang kita siapkan memang ini Pak Mafirion kita lagi menyiapkan bagaimana ini mekanisme kita bisa ikut serta memberikan pelatihan atau peningkatan kompetensi dari para pekerja kita. Ya saat ini sedang kita siapkan dan mestinya tadi pagi juga kita harusnya bicara dengan tim Kementerian Tenaga Kerja namun di *reshedule* nanti akan kita tindak lanjuti terus.

Kemudian terkait dengan investasi saya kira nanti Pak Amran akan mendalami ini terkait dengan transparansi BPJS Ketenagakerjaan sangat transparan untuk informasi-informasi ini tentunya sesuai dengan regulasi yang ada dan informasi tersebut seperti laporan keuangan itu bisa dilihat di *website* ini terbuka untuk umum di www.bpjsketenagakerjaan.co.id.

Investasi dimana saja saya kira Pak Amran Direktur Investasi kita akan menyampaikan. Kemudian investasi infrastruktur yang sering-sering disebut-sebut sebesar 73 triliun ini ingin kami sampaikan bahwa ini bukanlah investasi langsung tetapi investasi dalam bentuk surat berharga dan nilai 73 triliun bukan tercipta dalam satu dua tahun ini tetapi akumulasi dari perjalanan pengelolaan investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Investasi dalam bentuk instrumen itu seperti apa adalah dalam bentuk instrumen surat berharga investasi seperti obligasi, kemudian reksadana, kemudian juga saham. Kalau kita potret berdasarkan sektor industri ada industri manufacture, consumer, perbankan, kemudian infrastruktur dan sebagainya ini kalau di kelompokkan sebesar 73 triliun.

Kemudian tahun ini memang betul diperkirakan target investasi kemungkinan bisa tidak tercapai kalau kondisi perekonomian makro masih seperti ini. Saya kira nanti akan disampaikan lebih detail dari rekan kami Direktur Investasi. Mungkin dari saya cukup. Dari rekan Direksi silakan Pak Ilyas.

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Terima kasih Pak Dirut.

Yang terhormat Pimpinan serta Anggota Dewan yang terhormat Komisi IX,

Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Dirut dan mungkin beberapa hal yang belum terjawab tadi. Pertama terkait dengan PMI (Pekerja Migran Indonesia), ini sebenarnya ada tadi di tanyakan potensi. Memang 6 negara tujuan kita yang paling banyak antara lain:

- Taiwan
- Malaysia
- Singapura
- Hongkong

Ini yang menjadi sasaran kita dan kita fokus untuk menyiapkan sarana dan prasarana disana semua. Jadi untuk Taiwan misalnya ada 295.000 TKI kita disana, di Hongkong ada 160.000. Nah jadi untuk PMI ini kita baru berulang tahun di tugaskan pak Agustus tahun lalu. Nah sekarang dengan adanya Undang-Undang PMI aturan tentang PMI ini harus dibuatkan permenaker baru. Nah ini yang lagi di garap bersama dengan Naker apa saja benefitnya dan diluaskan benefitnya dari permenaker yang ada sekarang, jadi ditambah. Bapak dan ibu sekalian rancangan ini dan bisa

mencakup lebih luas lagi tetapi khusus untuk ABK ini perlu perapan pemerintah tersendiri, PMI-nya mengatur seperti itu.

Oleh karenanya mudah-mudahan peraturan Menteri dan peraturan pemerintah perancangan pemerintah tentang ABK ini bisa segera terbit sehingga menjadi lengkap perlindungan terhadap PMI. Usaha-usaha terhadap PMI ini memang cukup banyak bapak dan ibu sekalian termasuk PMI kita yang di Malaysia kita juga berusaha memberi perlindungan khususnya bagi tenaga kerja kita yang sudah lebih dulu berada disana. Nah kita bekerja sama dengan berbagai pihak bagaimana nasib warga negara kita yang bekerja disana supaya menjadi lebih baik lagi. Kemudian mengenai iurannya tadi iuran sudah disampaikan kalau untuk PMI atau tenaga kerja Indonesia kita ini mengacu kepada nominal murni. Jadi berbeda dengan tenaga kerja yang ada di dalam negeri, yaitu presentase dari upah yang diterima sebulan itu berbeda.

Jadi kalau untuk tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia ini langsung ditetapkan untuk sebelum berangkat selama di negara penempatan dan setelah pulang. Sebelum berangkat itu iurannya 37.000 untuk 5 bulan pertama, kemudian untuk di negara penempatan atau selama di tempat kerja sampai pulang itu sekitar 333.000 dengan total 370.000. Ini di bayar bertahap bapak dan ibu jadi sebelum berangkat yang 5 bulan itu di bayar lebih dulu, sehingga kalau gagal berangkat atau tidak jadi berangkat dalam 5 bulan itu tidak membayar iuran lanjutan, jadi mekanismenya seperti itu. Kemudian apa jaminannya atau benefitnya, dalam jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja migran kita yang di luar negeri itu di jamin apabila tenaga kerja itu meninggal dunia.

Jadi kalau akibat kecelakaan itu perlu perawatan pengobatan itu biasanya sudah ditanggung oleh pemberi kerja setempat mengikuti aturan sana tetapi kalau sampai meninggal dunia dapat dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 85 juta.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Pimpinan.

Pak berarti yang di bayarkan oleh PMI kita itu hanya jaminan kematian?

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dua program.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Jaminan apa pak?

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Berarti dua ya?

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Dua dan secara suka rela boleh mengikuti program jaminan hari tua.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Yang dua itu wajib?

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Wajib.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Berarti setiap bulan harus bayar mereka?

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Bayarnya sekaligus pak.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Sekaligus untuk berapa lama pak?

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Tadi, 5 bulan pertama sebelum berangkat itu 37.000.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Oh begitu.

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Terus setelah berangkat untuk 25 bulan selama di negara penempatan dan sampai pulang itu sekitar 333.000.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Pimpinan. Melalui Pimpinan ya. Berarti tadi kan yang bapak katakan hanya kalau ada jaminan kematian saja yang di cover seandainya mereka kecelakaan kerja tadi itu disana bagaimana pak?

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Untuk jaminan kecelakaan kerja itu yang di cover bagi yang di luar negeri mendapat jaminan kematian sebesar 85 juta tetapi kalau tenaga kerja itu masih pra sebelum berangkat berlaku seluruh peraturan bagi tenaga kerja kita disini. Jadi biar perawatan pengobatannya tetap di tanggung kalau sebelum berangkat. Kenapa ini tidak ditanggung kalau di luar negeri itu karena mengikuti aturan negara penempatan. Karena biaya perawatan pengobatan dijamin oleh pemberi kerja begitu pak.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Oh jadi iya ya. Ini supaya kita sama-sama paham pak ya. Supaya paham mungkin bapak lebih paham maknanya saya pertanyakan ini, artinya PMI yang sudah tiba disana mereka tetap saja kan bayar paket disini pak paket kecelakaan kerja sama kematian tadi yang bapak bilang untuk sekian bulan kedepan. Begitu kan, nah pada waktu mereka di negara penempatan bapak katakan tadi biasanya sudah mengikuti aturan yang disana. Oh berarti yang hanya di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan itu kalau hanya terjadi kematian tadi, ya kan balik lagi kesini. Kecelakaanya kan sudah disana katanya. Berarti uangnya itu kemana itu Pimpinan, uangnya itu maksudnya uang yang dari yang di bayarkan oleh pekerja tadi toh ternyata kan sesuai dengan aturan di negara penempatan tadi yang mengirimkan kan begitu pak. Mungkin ada MoU bahasanya memang ada PT A (...) negara setempat misalnya kita katakan Korea misalnya pak ya Korea Selatan misalnya ya.

Disana mungkin aturannya harus mengikut sertakan asuransi sekian, sekian, sekian. Sementara disatu sisi mereka sebelum berangkat sudah membayar paket tadi ini paket yang dua tadi paket kematian dan kecelakaan kerja. Walaupun mungkin bagi kita mungkin kecil tetapi bagi mereka kan itu besar, kan sayang. Itu pertanyaannya itu itu dikemanakan uang itu, kan begitu. Saya kira seperti itu pak.

F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, M.A.):

Pimpinan interupsi.

Saya juga sama ingin melakukan pendalaman, tadi kan saya bertanya soal kapitasi yang premi ya. Preminya flet apa tidak ternyata di jawab ada perbedaan antara premi yang di bayar di Indonesia dengan premi yang di bayar ketika dia sudah bekerja ya pak ya. Nah tadi disampaikan 37.000 untuk 5 bulan benar ya pak? Jadi itu perbulan berapa hitungannya tidak sampai 16.800 ya?

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Lain lain ini perhitungannya bu.

F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, M.A.):

Lain.

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Jadi pertama 37.000 itu terbagi untuk jaminan kecelakaan kerjanya 24.500. Kemudian untuk jaminan kematiannya 12.500 totalnya 37.000, 37.000 ini untuk dua program.

F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, M.A.):

Itu perbulan apa dihitung, tadi bapak menyampaikan hanya 5 bulan membayar 37.000.

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Untuk 5 bulan.

F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, M.A.):

37.000 lima bulan sekaligus?

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Iya.

F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, M.A.):

Nah tadi disampaikan kalau tidak jadi berangkat dia tidak akan meneruskan yang 330.000 33.000 tidak akan diteruskan, tadi kita ngobrol sama samping, itu uangnya berarti kalau sama dengan Mas Iqbal. Ini hanya berbeda saja, kalau dia tidak jadi berangkat berarti uang 37.000 dari masing-masing PMI yang tidak jadi berangkat itu uang itu masuk kemana pertanyaannya itu. Ya memang si masuknya ke BPJS Ketenagakerjaan, apa masuknya ke bagian yang ada tuannya tetapi tuannya tidak datang-datang atau masuk ke dalam uang yang tidak bertuan begitu di hitunghnya?

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Memang jaminan sosial ini bukan asuransi tetapi mekanismenya asuransi bu. Jadi ini sebenarnya untuk perlindungan selama 5 bulan. Kemudian sifat kita kan

adalah gotong royong, jadi ini kalau di bagi perbulan dan mungkin tujuh ribuan. Jadi ini saling bergotong royong tentunya di pakai untuk membayar yang klaim. Itu memang bagian dari mekanisme asuransi, tidak bisa begitu tidak ada klaim terus minta kembali. Ya jadi hukum yang bilang besar disini berlaku, memang ini mengiur sama-sama untuk memikul resiko yang ada.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Pimpinan. Ini hanya memberikan pendapat saja, memang kalau kita melihat bagaimana sistem pembayaran pekerja itu baik itu pekerja yang ada di Indonesia maupun PMI kita ya BPJS ini sebenarnya sehat sehat sekali. Belum lagi pak pekerja-pekerja yang di bidang konstruksi kan itu setahu saya itu kalau misalnya ada suatu pembangunan itu kan di cover semua walaupun kecil ya, artinya memang beginilah kondisi dari BPJS. Harapan saya begini pak harapan saya ya, benar bapak katakan tadi bahwa itulah memang metode asuransi betul kita akui. Harapan saya mudah-mudahan karena ini sudah menjadi dari Jamsostek sudah menjadi BPJS. Harapan saya kedepannya agar premi yang di bayarkan oleh pekerja itu bisa diberikan kembalilah manfaatnya untuk pekerja.

Seperti kan dulu di Jamsostek kan ada pembangunan perumahan untuk bekerja. Kalau sekarang masih boleh tidak pak? Masih ya, harapan saya seperti itu kedepannya agar fasilitas-fasilitas untuk pekerja itu lebih ditingkatkan lagi, itu saja Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Harapan, kalau harapan itu harus ditampung pak, jadi tidak panjang dia ceritanya. Silakan pak. Sudah Pak Ilyas?

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Mungkin sedikit lagi pak tadi mengenai PMI, kemudian mengenai nelayan. Kalau nelayan ini kelompoknya di kami adalah pekerja bukan penerima upah. Sama dengan petani kemudian kelompok kelompok lainnya dan memang cukup berat untuk mengedukasinya tetapi ada Kementerian atau dari KKP ini membuat atau ada surat perlindungan pak untuk nelayan ini dari tempatnya Ibu Susi, termasuk disitu sebetulnya dalam gangguan usaha. Ada Undang-Undangnya tersendiri yang mungkin ini masih juga perlu harmonisasi disitu melindungi hal-hal yang sama, sehingga saya baca kemarin 1 juta nelayan kontrak dengan Jasindo. Jadi ini sebetulnya harusnya masuk sekema jaminan sosial seharusnya. Ini sebenarnya bagian PBI (Penerima Bantuan Iuran) untuk nelayan tetapi kami tetap operasional ke daerah memberi perlindungan bagi nelayan-nelayan yang belum tercover di luar 1 juta itu.(rekaman terputus).

Kelompok-kelompok atau komunitas nelayan di beberapa tempat contohnya bahkan kita mencoba mengkreasikan bagaimana nelayan itu setiap menangkap

memasukan satu ikan untuk iurannya. Jadi jaminannya tetap sama seperti kepada penerima upah dan iurannya sangat murah ini yang 16.800 untuk dua program ini pak. Apa ini nelayan tetap kita beri perlindungan, sebetulnya di beberapa daerah menginginkan nelayan masuk ke kita tetapi memang ada yang sudah di jamin oleh dari KKP. Mudah-mudahan nanti dari Bapak-Bapak Dewan bisa membantu meluruskan ini masuk ke dalam sekema jaminan sosial. Kemudian yang ketiga satu lagi Pak Ketua, untuk piutang tadi kami juga sudah sangat terbantu dengan komite yang ada di Pak Safri kami bahu membahu membereskan piutang ini dan memang posisinya 2,7 triliun tadi 54%-nya macet terdiri dari 227.563 pemberi kerja.

Jadi ini piutang yang lama-lama ini ke bawa terus pak, karena mekanisme penghapusannya di BPJS Ketenagakerjaan ini belum ada. Kami mempunyai *problem* yang sama dengan BPJS Kesehatan. Ini lagi upayakan ada mekanisme penghapusannya. Nah jadi pasti membengkak terus karena umurnya tambah dan perhitungan dendanya tambah. Jadi yang macet dan diragukan itu ada 37.754 perusahaan yang macet dan diragukan ada sekitar 32.900 perusahaan. Nah inilah yang kami coba jangan sampai menambah dari yang lancar menjadi kurang lancar, yang tadi kurang lancar menjadi diragukan. Nah ini staff kami di daerah sangat bekerja keras untuk bagaimana sampai tidak membesar atau pun iuran ini piutang iuran ini tidak sampai membesar dan alhamdulillah untuk ketepatan waktu pembayaran iuran pak sekarang dengan upaya-upaya ini sudah cukup bagus yaitu mencapai mendekati 70% yang biasanya 2 tahun lalu ini hanya posisinya 48% jadi sudah cukup meningkat dengan upaya-upaya dalam 2 tahun terakhir ini.

Mudah-mudahan target kami 85% dari peserta formal ini bisa membayar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan pak.

DIREKSI BPJS TK (AMRAN):

Baik. Terima kasih Pimpinan Komisi IX.

Yang terhormat Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi IX,

Saya mau mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari,

Yang terhormat Anggota Dewan,

Yang pertama dan rata-rata saya melihat pertanyaannya itu hampir similar. Jadi mungkin kami jawab secara lengkap secara utuh tetapi terjawab semua. Pertama Pak Nurmansyah mengenai laporan bahwa kita dalam hal ini Direktorat Keuangan BPJS bekerja sama dengan Direktorat Renstra itu setiap bulan itu melaporkan kinerja keuangan baik itu terdapat di dalam investasi dan kepesertaan itu setiap bulan kepada

OJK dan juga kepada Dewas setiap bulan juga kami sampaikan. Kepada publik kita menyampaikan dua kali dalam satu tahun dan tadi sudah disampaikan Pak Anggota Dewan Pengawas Pak Safri KAP dan BPK juga memeriksa kita, juga OJK juga memeriksa kita. Jadi itulah yang regulasi yang menjaga BPJS Ketenagakerjaan selama ini. Mengenai jumlah dana kelolaan per-Agustus dana kelolaan kita Rp339.724.000.000.000 itu terdiri dari 6 instrumen yaitu deposito, saham, obligasi, reksadana, penyertaan langsung dan property.

Nah kalau yang deposito 6 instrumen ini kalau alokasi asetnya itu alokasi aset dari total atau folio deposito itu 9%, dari obligasi 61%, saham 19,1%, reksadana 10,18%, property 0,55% dan penyertaan hanya 0,13%. Jadi mayoritas ada di 4 yang pertama yaitu deposito, obligasi, reksadana dan saham. Dari 4 yang 4 ini 99% kurang lebih, dari 4 ini ada yang terkena dampak penurunan dari IHSG. Nah itu jumlahnya adalah 29,27% yaitu di saham dan di reksadana, sisanya sebesar hampir 70% 69% itu terkait dengan pendapatan tetap.

F-PDIP (NURMANSYAH E. TANJUNG, S.E.):

Pimpinan interupsi Pimpinan.

Yang saya tanyakan itu pak, kita ini kan bertanya bapak investasikan misalnya di deposito. Itu dimana saja misalnya Bank Mandiri berapa.

DIREKSI BPJS TK (AMRAN):

Iya. Nanti saya akan jelaskan semuanya akan saya sampaikan.

F-PDIP (NURMANSYAH E. TANJUNG, S.E.):

Oke. Masih belum lanjut. Silakan.

DIREKSI BPJS TK (AMRAN):

Jadi dari 4, 2 itu pendapatan tetap. Dua itu yang terkait bisa berdampak karena gejala dari IHSG yaitu 29,27%. Nilainya itu 99.471.000.000.000 tetapi jangan khawatir pak, Insya Allah saya sudah pir group saya sudah pir group minta data dari perbankan mungkin Bapak Ibu Anggota Komisi IX lebih baik datanya. Kami meminta kepada Bank Pemerintah pr group Taspen, Asabri, Jiwasraya. Jiwasraya mungkin sudah mau bell out malah Jasindo kita yang terbaik masih hasilnya alhamdulillah mudah-mudahan kita masih tetap bisa menjaga itu. Kita saya meminta data kepada mereka memang mungkin insider information tetapi saya mau tahu posisi kita itu dimana. Itu yang kita lihat dan alhamdulillah sampai saat ini kalau bapak punya data semua di banchmark itu pasti bapak ibu akan melihat bahwa alhamdulillah masih yang terbaik.

Nah indeks harga saham gabungan ini jatuh dari yang tertinggi Rp6.689,29 menjadi terendahnya 5.633. Itu turunya jatuhnya 15,78% saham dan juga reksadana, itulah yang 99 itu yang terkait terkena dampak turunnya yang 15,78% tetapi 15,78%

ini tidak semata-mata kita turunnya sampai segitu. Kita tetap masih menghasilkan hasil kita dari saham masih 9,64%. Jadi kenapa begitu, karena di satu dua tiga bulan pertama yang indeks masih naik itu saya sudah relesgain, saya sudah ambil gainnya. Bahkan pencapaian saya 7 bulan saya sudah capai di 3 bulan pertama pada saat itu. Nah kemudian saya masuk lagi, disitulah baru kita kena dampaknya penurunan dari IHSG. Nah kemudian yang berikutnya 69% 61-nya obligasi dan depositonya 9%.

Obligasi ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Saleh Daulay Pak Ketua Bapak Pimpinan. Itu kita punya regulasi.

F-PDIP (NURMANSYAH E. TANJUNG, S.E.):

Pimpinan sedikit.

Tadi sebelum masuk di obligasi pak di saham itu bapak tanamkan di saham apa saja itu pak?

DIREKSI BPJS TK (AMRAN):

Baik. Kalau di saham kita masuk daftarnya banyak sekali pak tetapi kita masuk kita ada skoring. Skoring itu kita nilai kinerja keuangan, terus kemudian portopolionya dia, saham yang dijual berapa persen itu rata-rata hampir 95% itu adalah BUMN, yang swasta hanya sedikit. Contoh misalnya deposito, kebetulan deposito. Saham ada datanya juga pak dia di sektornya itu dari 64 triliun itu kita ada sektor keuangan, infrastruktur, utilitas, industri, barang dan konsumsi. Nah sektor-sektor itu tetapi 90%-nya adalah BUMN. Kita tidak masuk ke swasta. Jadi kita menghindari itu kita masuk ke swasta. Kalau deposito dari 30 triliun atau 9% tadi itu 60% saya tempatkan di BPD dan 31% kami tempatkan di Bank Pemerintah BUMN. Sisanya 6,64% di Bank Swasta.

Nah yang 60% BPD kenapa kami menaruh di BPD besar? Karena kami mendapatkan return yang baik saat ini, dia sampai saat ini masih bisa memberikan sekitar 8,5 sampai 9% deposito. Sedangkan kami kena hit di saham otomatis deposito kami mesti mencari rat-rat yang tinggi, menurunkan porsi Bank Pemerintah dan menaikkan porsi BPD. Bahkan kalau boleh kami sampaikan, bahkan deposito misalnya jangka waktunya 1 tahun baru jatuh tempo di Maret atau di April kami melakukan negoisasi dan kami break hari ini pada saat jatuh tempo bunga tanpa penalti, kami tempatkan kembali dengan suku bunga yang naik. Karena memang suku bunga yang naik saham yang turun. Jadi untuk optimalisasi pendapatan karena harga saham jatuh kami melakukan break deposito kepada seluruh Bank terutama Bank BPD.

Itu portopolio deposito, nah portopolio obligasi yang terbesar. Kita punya regulasi yang namanya POJK01 dan POJK36, dimana 50% dari portopolio obligasi itu SBN. Nah 50% dari portopolio kita itu harus ke SBN (Surat Berharga Negara), jadi Pak Pimpinan Bapak Saleh. Bahwa kita tidak masuk ke infrastruktur dalam arti direct investment. Kami membeli SBN yang diterbitkan pemerintah terus kami beli, jadi jaminan pembayaran kepada BPJS dari pemerintah itu 3 bulan sekali itu di bayar pemerintah dan sekarang ini returnnya kalau nominalnya 61%, returnnya sekarang obligasi 8,5 pak 8,5, itu juga kondisinya sekarang naik. Lebih bagus dari pada

deposito, deposito memang return dari 4 itu yang terkecil. Nah cuma deposito sekarang ini untuk meningkatkan karena saham kami lagi kena di saham. Kami break depositonyab dan kami tempatkan kembali dengan rat yang naiknya rata-rata 1,25 sampai 1,75% dari rat sebelumnya.

Yang mungkin mestinya jatuh temponya di Maret, kami break bulan September. Nah itu dengan rat naik 1,25 sampai 1,75%. Dari obligasi yang 61 itu totalnya adalah total nilainya adalah 207 triliun, itu masuk ke pemerintah dan itu kalau boleh kami sampaikan juga 207 adalah masuk ke dalam 4500 triliun yang disampaikan pemerintah itu modal pemerintah atau modal pemerintah di dalam masuk ke infrastruktur. Nah 207 triliunnya adalah uangnya BPJS. Jadi kalau.

F-PDIP (NURMANSYAH E. TANJUNG, S.E.):

Pimpinan boleh Pimpinan?

Pak tadi bapak katakan tadi ada sebagian masuk ke infrastruktur pak ya. Kira-kira keuntungan dari BPJS apa itu pak yang bisa di dapatkan?

DIREKSI BPJS TK (AMRAN):

Kami sampaikan tadi bahwa kami tidak masuk ke sektor infrastruktur secara dairek pak tetapi kami masuk kepada SBN yang diterbitkan pemerintah yang notabennya untuk infrastruktur. Nah dan disitu kami ada regulasi 50% dari portopolio itu kami harus masuk ke SBN. Penerbitnya adalah OJK, POJK01 dan POJK36. Nah jadi.

F-PDIP (NURMANSYAH E. TANJUNG, S.E.):

Pimpinan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tidak ini saya mau jelasin.

Untungnya dia dapat 8,5%. Jadi kalau dia titip 207 triliun untungnya itu 8,5% untung perusahaan, begitu. Jadi dari pada ke Bank Bank itu Cuma berapa persen tadi pak?

DIREKSI BPJS TK (AMRAN):

7,29 pak.

KETUA RAPAT:

Nah itu, ini 8,5% itu untungnya.

F-PDIP (NURMANSYAH E. TANJUNG, S.E.):

Pimpinan.

Mungkin saya minta nanti tertulis saja pak biar kita lebih enak. Nanti disampaikan tertulis.

KETUA RAPAT:

Begini saya usul menambahkan Pak Nurmansyah. Nanti kan ini sebetulnya BPJS Tenaga Kerja ini masih di panggil Pimpinan DPR RI kokestra yang kemarin belum selesai. Jadi dalam waktu dekat ini ini pasti akan di bicarakan lagi pak. Saya pikir tidak jauh beda ini dengan ini. Jadi kemarin ada yang ikut Ibu Siti Masrifah ya?

F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, M.A.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Nah mungkin nanti akan di dalam lagi disana disitu bisa disampaikan lagi pak lebih detail. Ini waktunya sudah pukul 17.00 WIB soalnya pukul 17.00 WIB Sore. Nanti kita akan mendalami disitu. Nanti apakah rekomendasi dari Pimpinan DPR RI itu seperti apa tindak lanjutnya nanti kita akan diskusikan. Ya termasuk kemungkinan tadi mungkin Panja apa tidak segala macam, nanti disana saja. Panjangnya sudah ada nanti kita dalam lagi. Setuju ya, masih ada tidak yang lain. S ilakan.

F-PDIP (NURMANSYAH E. TANJUNG, S.E.):

Boleh saya teruskan dua poin.

DIREKSI BPJS TK (AMRAN):

Teruskan teruskan saja dulu pak.

Hasil investasi dari pertanyaan itu, hasil investasi kalau kami blendit dari hasil semua itu kita memberikan kepada peserta saat ini 8,7% blendit dari saham, obligasi, deposito, reksadana dan penyertaan langsung serta property itu di blendit. Kami memberikan kepada peserta itu 8,7%. Rata-rata sesuai Undang-Undang minimal kita harus memberikan rat deposito rata-rata Bank Pemerintah 12 bulan. Jadi kalau rata-rata sekarang 5,5 kami memberikan saat ini masih 8,7% kepada peserta. Yang terakhir pertanyaan dari Ibu Siti Masrifah tentang MLT, bahwa kami masih memberikan MLT perumahan kepada peserta. Ibu meminta bahwa supaya diberikan manfaat langsung jangan yang masih yang masih nanti. Kalau yang langsung itu kami memberikan. Sekarang ini kami sudah memberikan pembiayaan perumahan kepada peserta sebesar 3.442 rumah.

Dari program pemerintah sejuta rumah kita 3.442 itu dari BPJS dan ini terus bertambah dengan posisi dananya adalah sebesar Rp760.316.000.000. Saya rasa demikian Pimpinan. *wabillahi taufik hidayah*

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, M.A.):

Pimpinan sedikit saja.

MLT tadi saya tergodanya itu, ada tidak pak itu peserta kan itu benefit dua peserta ya. Itu ada kriteria tidak khusus yang mendapatkan dari 3.442 tadi? Kriteria khusus yang atau semua boleh memanfaatkan itu.

DIREKSI BPJS TK (AMRAN):

Kriterianya mudah sekali bu, dari seluruh peserta bisa mendapatkan ini asal dia sudah menjadi peserta selama 1 tahun. Ikut JHT selama 1 tahun dan itu dia bisa meminta kepada Bank yang bekerja sama sama kami. Saat ini yang berkerja sama baru 4 Bank yaitu Bank Pemerintah semuanya. BTN, Mandiri, BNI, BRI. Demikian pak.

KETUA RAPAT:

Baik. Pak Ichsan.

F-GOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Baik. Saya sedikit saja.

Pertama terkait dengan apa yang disampaikan Pak Saleh tadi bahwa memang ada pertemuan bukan pertemuan ya. Ada rapat lanjutan dengan orkestra terkait dengan hal ini tetapi juga sebenarnya di Komisi IX ini sendiri sudah ada Panja BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian nanti setelah masa sidang sekarang ini nanti sekitar bulan-bulan masa sidang berikutnya maksud saya. Sekitar bulan November itu kita coba jadwalkan kembali terkait dengan apa yang tadi di pertanyakan oleh teman-teman tetapi pertanyaan tadi teman-teman itu itu bisa di tindak lanjuti pak dengan jawaban tertulis tetapi nanti kita akan dalam lagi di dalam Panja BPJS Ketenagakerjaan. Kebetulan ini nanti kita akan tindak lanjuti kebetulan Panja ini sudah ditetapkan sudah jauh-jauh hari ya tetapi ini belum di kita aktifkan kembalilah Panja ini, itu yang pertama.

Yang kedua terkait dengan Pak Ilyas ini. Saya mau komentari terkait dengan kerja sama dengan beberapa Lembaga misalnya tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Memang saya tahu saya dulu juga di Komisi IV, memang itu sudah ada Undang-Undangnya, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan itu memang sudah ada. Amanat asuransi untuk nelayan dan itu betul 1,1 juta tetapi kemudian persoalannya adalah itu ko di lemparnya ke tempat lain bukan ke BPJS

Ketenagakerjaan. Nah ini kan memang harus menjadi evaluasi terus menerus apakah kemudian, kenapa ko Kementerian Kelautan itu tidak di kepesertaan untuk asuransi ini tidak diberikan kepada BPJS Tenaga Kerja tetapi ke asuransi yang lain. Saya tidak tahu seperti apa tetapi kalau kemudian saya pahami tentang Ibu Susi misalnya Ibu Menteri memang harus ditunggu pak Bu Menteri ini artinya ditunggu penggantinya bisa jadi Pak Ilyas, Pak Agus atau Pak Noval begitu kan yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan karena memang menunggu saja begitu.

Kira-kira begitu pak tetapi saya melihat memang ini harus di evaluasi pak, evaluasi kenapa kemudian ko Kementerian Lembaga lain itu tidak menyertakan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan kepesertaan itu. Sebenarnya di pertanian juga ada, saya tidak tahu, asuransi pertanian tetapi apakah tenaga petaninya atau asuransi lahannya nah ini perlu di tindak lanjuti pak. Sebenarnya sama banyak, makannya nanti teman-teman di dalam Panja BPJS Ketenagakerjaan itu nanti kita akan dalam terkait juga apa yang disampaikan oleh Pak Nurmansyah sama Pak Mafirion terkait dengan investasi yang kita perlu perdalam yang lebih detail kira-kira begitu. Itu yang saya ingin sampaikan karena ini sudah sesuai dengan kesepakatan itu kita jam 17.00 WIB mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti kedepan begitu. Kira-kira begitu Pak Ketua. Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Sudah pukul 5 pukul 17.00 WIB. Saya masih bisa rapat sampai 21.00 WIB tetapi kalau teman-teman menginginkan 17.00 WIB ya kita tutup. Cukup ya?

PESERTA RAPAT:

Cukup.

KETUA RAPAT:

Baik. Kalau begitu coba tampilkan draft kesimpulannya dahulu biar kita ini. Pak Agus langsung bergetar dia saya bilang pukul 21.00 WIB. Coba kesimpulan rapatnya mana draftnya, besarin sedikit ya....**(rekaman terputus)**. Mestinya inimestinya print outnya kasih sama Pak Dirut satu sama Ketua Dewas satu atau ini hidup tidak? Oh hidup yang ini. Sudah kelihatan pak disana? Sudah ya. Oke kita baca.

1. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kinerja dalam perluasan kepesertaan dan manfaat jaminan sosial kepada 121.000, 121.022.423 pekerja dengan bekerja sama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta.

Dengan yang pertama itu buang saja, mana boleh ada dengan dua kali dalam satu kalimat dekat-dekat begitu. Paham tidak? Pekerja bekerja sama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta.

2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kerja sama dengan BNP2TKI dan Kementerian dan Lembaga terkait. Kementerian dan Lembaga terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri guna memberikan perlindungan jaminan sosial dan perlindungan asuransi di luar negeri bagi pekerja migran Indonesia termasuk pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang bekerja melalui BNP2TKI dan PMI Mandiri.

Yang bekerja begitu maksudnya, oke. Ini lama-lama jadi TA saya ini pak, perbaiki.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan rekomendasi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kinerja kepesertaan program jaminan sosial PMI dan masukan-masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perluasan kerja sama dengan organisasi-organisasi profesi yang ada sebagaimana di harapkan Komisi IX DPR RI.

Ini draftnya kita, cocok ya sesuai? Oke kita tanya

DIRUT BPJS TK (AGUS SUSANTO):

Pak.

KETUA RAPAT:

Belum pak ini anggota dulu pak. Oke cukup? Cukuplah ya. Nomor 4 itu Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan memperluas kerja sama dengan organisasi profesi. Organisasi profesi ini banyak yang sudah ada, tadi ada itu beberapa yang sudah ada. Yang belum ada masih banyak itu. Jadi itu kita harapkan bekerja sama dengan itu. Kaya atvokat itu kalau di tingkatkan lagi banyak itu pak pesertanya berapa, kan itu belum tentu ikut asuransi semua, begitu. Cukuplah ya. Oke Dreksi BPJS silakan pak.

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Terima kasih Pimpinan.

Yang nomor 1 mungkin angka 121 bisa digantikan dengan kalimat sesuai rotmap. Jadi kalimatnya menjadi untuk meningkatkan kinerja dalam perluasan

kepesertaan dan manfaat jaminan sosial kepada pekerja sesuai rotmap dengan instansi baik pemerintah maupun swasta. Rotmap yang kita dapatkan dari Bapenas pertama angka 121 itu adalah angka seluruh tadi pekerja tetapi setelah di bicarakan dengan pemerintah kan tidak mungkin semua 121 itu eligibel untuk masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa, karena di dalamnya ada TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil yang bukan di tangani oleh BPJS Tenaga Kerja. Kemudian ada pekerja yang berusia 15 tahun itu termasuk disitu. Sedangkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu syaratnya adalah telah mempunyai KTP.

Oleh karena itu beberapa hal itu di keluarkan yang menjadi eligibel untuk menjadi peserta adalah untuk tahun ini 89,9 juta. Nah ini ada rotmapnya yang kita harus capai tahun pertahun sehingga pada tahun 2021 80% total pekerja formal harus tercover 80% pekerja formal harus tercover 15% pekerja bukan penerima upah harus tercover. Jadi.

KETUA RAPAT:

(...) bagaimana tadi pak, ini sudah benar begini?

DIREKSI BPJS TK (ILYAS):

Iya jadi maksudnya rotmap itu di dalamnya sudah angka-angkanya (...). Ada tahun depan berapa tahun depan berapa begitu. Rotmap ini nanti bisa kita kasih angkanya kalau memang ingin di jabarkan lebih lanjut pak tetapi rotmap ini di resmi dituangkan oleh pemerintah. Saya kira ini juga berlaku tadinya untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerja. Tahapannya untuk mencapai 80% cover dan 15% BPU sudah ada pak, 100% bisa konstruksi begitu pak.

KETUA RAPAT:

Cuma itu kan pak?

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Pimpinan. Boleh Pimpinan ya?

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Iqbal.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Sebenarnya saya yang poin nomor 2 itu, yang poin 2.

KETUA RAPAT:

Sebetulnya tadi jatahnya anggota kita sudah tetapi tidak apa-apalah ya. Coba.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Tidak apa-apa ya, tidak ini ini berkaitan dengan poin nomor 2. Itu kan kita mendesak agar BPJS bekerja sama dengan BNP2TKI untuk PMI. Sebenarnya tadi dari paparan dari BPJS Tenaga Kerja dan Dewas itu sebenarnya manfaat yang di peroleh oleh PMI kita kan tidak sebegitu banyak kecuali jaminan kematian dan mungkin jaminan hari tua tetapi kalau kecelakaan kerja kan tidak bisa sebenarnya. Maksud saya ini hanya pendapat saya saja bahwa memang bahasa mendesak itu ya di apa sedikitlah. Karena saya melihat tadi kan seperti paparan tadi dari BPJS dikatakannya itu tergantung dari PT yang mengirimkan atau dari peraturan dari negara setempat yang dimana PMI itu bekerja. Nah kalau misalnya ada kecelakaan kerja disana ya otomatis kalau PT-nya sudah mengcover kerja sama dengan asuransi disana ya bisa tetapi kalau tidak terlunta-lunta juga kecuali kalau dia meninggal baru dan sebenarnya meninggal pun itu itu sudah tanggung jawab dari Kedubes kita disana, selama ini kasusnya seperti itu.

Jadi artinya manfaat itu kecuali ya, manfaat untuk JHT saya sepakat jaminan hari tua, jaminan pensiun. Itu begitu mereka kembali kesini uang itu mungkin bisa diambil bisa di manfaatkan untuk keperluan merak tetapi kalau untuk JKK itu saya kira tidak ada manfaatnya. Bayat tetapi kemudian mereka kecelakaan kerja disana BPJS tidak bertanggung jawab diserahkan lagi kepada negara penempatan sama PT-nya. Nah seperti itu Pimpinan, hanya pendapat saja.

KETUA RAPAT:

Ya itu pendapat itu sama saja anda kan bicara di rapat ini berarti pendapat harus di diskusikan. Jadi sebetulnya di dalam Undang-Undang yang baru itu Undang-Undang PMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) itu kita mengamankan kepada BPJS untuk memberikan perlindungan maksimal semua dilindungi. Masalahnya itu kemarin itu BPJS Ketenaga Kerjaan ini hanya punya 4 produk jaminan kematian, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu masalahnya sebetulnya tetapi karena PP-nya ini belum keluar semua aturan-aturan turunan dari turunan dari pelaksanaan Undang-Undang itu belum turun semua maka kemarin itu kita mendesak kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk tadi memasukan semaksimal mungkin yang bisa di cover oleh BPJS Tenaga Kerja sehingga dengan demikian tenaga kerja kita di luar negeri itu memang terlindungi. Jadi ini lagi di upayakan termasuk kemarin yang di Taiwan kan ikut juga BPJS (...) memulangkan ya kalau tidak salah yang meninggal.

Ada pak manfaatnya sudah di cobakan. Cuma memang masih perlahan-lahan, juga lagi sekarang BPJS Tenaga Kerja lagi melakukan konsolidasi kepesertaan jadi kalau tidak salah saya kan belum maksimal ini. Dapatnya baru berapa tadi saya

melihat 100 miliar pak ya seratusan miliar kalau tidak salah saya tadi 100 sekian miliar. Sementara kalau pakai konsorsium BPJS yang lalu itu sudah mencapai 500 miliar. Berarti bapak masih ada sekitar baru 20% kalau tidak salah, 20% ya dari total yang mestinya bapak harus daftarkan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini masih lama ini Pak Iqbal masih lama, artinya masih ada butuh waktu untuk menyesuaikan aturan yang lain turunan dari pada Undang-Undang PMI itu dan itu bisa bisa dimaksimalkan. Kalau kita kan berharap semua dilindungi, kalau ada apa-apa ya BPJS kalau ada apa-apa BPJS.

Cuma konsekuensinya memang penganggarannya juga harus jelas. Jadi tanggungan dari PPTKIS namanya itu pak perusahaan yang memberangkatkan dan perusahaan yang menerima di Saudi itu atau di luar negeri itu itu harus juga maksimal, begitu. Ada lagi tidak ini saya sudah bantu BPJS loh pak menjelaskan ini sehingga Pak Iqbal diam. Kalau tidak kan bisa panjang dia itu, walaupun yang saya jelaskan itu belum lengkap. Ada lagi yang lain tidak? Cukup ya. Baik ini kita terima dulu, ini sudah jam 17.20 WIB soalnya. Pak Agus sudah cocok? Semua sudah? Pak Dewas? Sudah sudah cocok.

(Rapat Setuju)

Nanti jangan gara-gara yang mimpin ini oposisi lalu semua tidak setuju kan rap repot kita. Baik bapak ibu saudara, saya persilakan Pak Ketua Dewas atau Pak Direktur BPJS untuk menyampaikan kata akhir.

DEWAS BPJS TK:

Baik.

Bapak Pimpinan Komisi IX DPR RI dan Para Anggota yang hadir,

Atas nama Dewan Pengawas kami mengucapkan terima kasih atas RDP ini yang saya kira banyak memberikan inspirasi kepada Dewas untuk memperbaiki kinerja dan memberikan saran pertimbangan kepada Direksi khususnya dalam peningkatan kepesertaan maupun khususnya pada PMI. Saya kira itu saja, mudah-mudahan pertemuan kita kedepan akan lebih membawa manfaat bagi kita semua.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih pak.

Terima kasih kepada seluruh teman-teman Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, Terima kasih juga kepada Dewan Pengawas dan jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang sudah hadir beserta seluruh rombongan,

Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini mendatangkan manfaat, jika tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan dalam rapat ini. Izinkan saya menutup rapat ini dengan bacaan *alhamdulillah hirobbil alamin, nashrun minallah wa fathun qarib wabasyiril mukminin*

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

Rapat ditutup pukul:16.47 WIB

Jakarta, 25 September 2018

Ketua Rapat,

DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA

Anggota: A-460